YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI OLEH DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DI KELURAHAN KEMPAS JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

YOGI RAYNALDO

147310359

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	:	Yogi Raynaldo
NPM	:	147310359
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian koferehensif.

Pekanbaru, November 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si	**Andriyus, S.Sos, M.Si**

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Budi Mulianto, S.IP,.M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	:	Yogi Raynaldo
NPM	:	147310359
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, April 2020

Ketua	Sekretaris
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si	**Rizky Setiawan, S.IP., M.Si**
Anggota	anggota
Dita Fisdian, S.IP., M.IP	**Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si**
Wakil Dekan I	Anggota
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si	**Andriyus, S.Sos., M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Yogi Raynaldo
NPM	:	147310359
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, April 2020

Ketua	An. Tim Penguji
	Sekretaris
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si	**Rizky Setiawan, S.IP., M.Si**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I	Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si	**Budi Mulianto, S.IP., M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 031 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Desember 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal, 28 Desember 2019 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Yogi Raynaldo
N P M	:	147310359
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	***Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hulu.***
Nilai Ujian	:	Angka : " 87,6 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1.
2.	Rizky setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Anggota	3.
4.	Dr. Khairul Tahman, S.Sos., M.Si.	Anggota	4.
5.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5
6.	Agung Wicaksono, MPA.	Notulen	6.

Pekanbaru, 28 Desember 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk usulan penelitian ini dengan judul "**Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir"**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini banyak pihak yang dilibatkan dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCI.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP, M.Si selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I (Satu) dan ketulusan hati dengan kesabarannya membimbing dan mengarahkan hingga karya tulis ini selesai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II (Dua) yang telah bersedia memberikan masukan, ilmu, membimbing, dan mengarahkan hingga karya tulis ini selesai.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan studi ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak/Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang.
7. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah dan Ibunda tercinta, beserta keluarga besar yang selalu mendoakan memberikan support materil dan non-materil kepada penulis sehingga apa yang dicita-citakan dapat diwujudkan dengan baik. Alhamdulillah.
8. Teman-teman seperjuangan IP angkatan 2014 dan kerabat-kerabat sahabat yang telah banyak memberi masukan dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Semoga semua bimbingan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta kasih sayang dan nasehat yang diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dan Rahmat dari Allah SWT. Demikianlah, semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Februari 2019

Penulis,

Yogi Raynaldo

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**

BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRAC ..... **xiv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 19
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 19

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **22**

A. Studi Kepustakaan. 22
1. Ilmu Pemerinatahan 22
2. Pemerintahan 24
3. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan 28
4. Teori Manajemen 31
5. Konsep Pemberdayaan 33
5.1 Pemberdayaan Sebagai strategi Kemiskinan 33
5.2 Pemberdayaan 35
5.3 Pemberdayaan Masyarakat Petani 40
6. Teori Kesejahteraan 41
B. Penelitian Terdahulu. 43
C. Kerangka Pikir..... 46
D. Konsep Operasional 47
E. Operasional Variabel 49
F. Proposisi Penelitian 50

III. METODE PENELITIAN **51**

A. Desain Penelitian 51
B. Unit Analisis Penelitan 52
C. Informan 52

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Teknik Penarikan Informan 54
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Analisis Data 55
G. Lokasi Penelitian 57
H. Jenis Dan Sumber Data 58
I. Jadwal Kegiatan 59

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PEELITIAN 60

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir 60
B. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir 72
C. Gambaran Umum Kelurahan Kempas Jaya 73
D. Struktur Organisasi Dinas Tanaman, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir 74
E. Fungsi dan Tugas Dinas Tanaman, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir 76

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 85

A. Identitas Informan 85
B. Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas jaya Kecamatan Kempas Kabuapten Indragiri Hilir 89
C. Hambatan – Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Upaya Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas jaya Kecamatan Kempas Kabuapten Indragiri Hilir 112

VI. PENUTUP 118

A. Kesimpulan 118
B. Saran 119

DAFTAR KEPUSTAKAAN 121

LAMPIRAN 126

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir 2013-2016....	10
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	11
Tabel 1.3	Jenis Pertanian atau Tanaman Di Kecamatan Kempas	12
Tabel 1.4	Data Produktivitas Petani Padi di Kabupaten Indragiri Hilir.....	13
Tabel 1.5	Daftar Nama-nama Kelompok Tani Di Kecamatan Kempas Kabuapten Indragiri Hilir.....	14
Tabel 1.6	Kegiatan dalam Program Peningktan Kesejahteraan Petani yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura periode 2013-2018.....	16
Tabel 2.1	Konsep Operasional dan Operasional Variabel Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir	47
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	51
Tabel 5.2	Usia Informan.....	89
Tabel 5.3	Pendidikan Informan.....	91

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Kempas	10
Gambar 2.1	Kerangka pemikiran tentang Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Indragiri Hilir.....	45
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Indragiri Hilir.....	74

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yogi Raynaldo
NPM	: 147310359
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian	: Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas maka saya menyatakan bersedia telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Januari 2019

Pelaku Pernyataan,

Yogi Raynaldo

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI OLEH DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DI KELURAHAN KEMPAS JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

Oleh
Yogi Raynaldo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya dan Faktor- faktor penghamabat dari Pemberdayaan Petani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator Pemberdayaan yang di pergunakan meliputi penyadaran, penguatan dan perlindungan. Teknik analisa penelitian yang berlokasi di Kelurahan Kempas Jaya ini adalah metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi pada lokasi teliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti serta data sekunder diambil secara tidak langsung dari sumbernya dan data yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sementara teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah – langkah model interaktif. Analisis interaktif ini merupakan siklus dan interaktif, artinya peneliti dala melakukan proses penelitian siap bergerak pada empat sumbu yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan teknik analisi ini peneliti menyimpulkan dan menilai bahwa Pemberdayaan Petani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lemah. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan memberikan pelatihan mengenai penggunaan alat pertanian, memastikan bantuan yang diberikan kepada petani tepat sasaran, mengusahakan jaminan penjualan padi milik petani seperti membuat strategi agar hasil dari produksi padi lebih menguntungkan petani, agar Tenaga Penyuluh & Pendamping pertanian untuk segera ditambah menjadi satu tenaga penyuluh setiap kelompok tani dan anggaran dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang ada digunakan secara tepat pada sasaran karena banyaknya bantuan yang belum di dapat oleh petani serta minimnya sosialisasi yang diberikan kepada petani yang menjadi pengambat berjalannya permberdayaan petani di Kelurahan Kempas Jaya

Kata Kunci : Pemberdayaan, Petani, Kesejahteraan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EMPOWERMENT OF FAMERS THROUGH A PROGRAM TO IMPROVE THE WELFARE OF FAMERS BY THE SERVICE OF FOOD CROPS, HORTICULTURE AND ANIMAL HASBANDRY IN THE VILLAGE OF KEMPAS JAYA, KEMPAS SUB-DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY

ABSTRACT

By

Yogi Raynaldo

This study aims to determine the efforts and factors of empowerment of Farmers Empowerment in the Kempas Jaya District of Kempas District through the Improvement of Farmers Welfare Program by the Office of Food Crops, Horticulture and Animal Husbandry of Indragiri Hilir Regency. Empowerment Indicators used in supporting awareness, strengthening and protection. The research analysis technique located in Kelurahan Kempas Jaya is a qualitative descriptive method that describes the news that occurs at the meticulous location. Informants in this study were 10 people. The sampling technique used in this study is purposive sampling, which is sampling of data sources with certain considerations through observation, interviews, documentation and literature study. Types and data collection techniques used consist of, primary data obtained directly from respondents at the study site equipped with secondary data taken directly from the source and data obtained from libraries, such as books containing research. While the data analysis technique used in this study uses interactive model steps. This interactive analysis is a cycle and interactive, namely research in conducting the research process ready to move in four directions, namely the process of data collection, data reduction, data presentation and conclusion or verification. Based on this analysis technique, the researcher concludes and assesses the Empowerment of Farmers in the Kempas Jaya District of Kempas District through the Farmers Welfare Improvement Program by the Food Crops, Horticulture and Animal Husbandry Office of Indragiri Hilir Regency which is still relatively weak. Recommendations that need to be considered with regard to providing training on agricultural use, requesting assistance given to farmers on target, seeking retailer sale of farmer-owned such as making strategies so that the results of rice production are more profitable for farmers, so that agricultural extension workers & advisors to be immediately added into one power extension workers for each farmer group and budget in the implementation of the existing Farmers Welfare Improvement Program are used right on target because the amount of assistance that cannot be done by farmers as well as minimization of socialization given to farmers who become moving obstacles

Keywords: Empowerment, Farmers, Welfare

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran pemerintah sebagai alat kelengkapan negara yang dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara yang salah satunya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Fungsi pokok pemerintahan terletak pada tiga pembidangan yaitu (1) pelayanan, (2) pemberdayaan, (3) pembangunan (Rasyid, 1998: 12). Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, hal tersebut menjadi urusan pemerintah konkuren bagi daerah yang tertuang dalam Undang – undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Kemudian pada pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindugan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan, dan
18. Kearsipan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Salah satu fungsi pemerintahan yang penting bagi masyarakat adalah pemberdayaan. Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang berasal kata memberikan daya (Sumddiningrat dan Nugroho, 2005:112). Pemberdayaan berarti upaya dari suatu pihak dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang masih berada dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan, dan membutuhkan pertolongan agar lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi, dan demokratisasi (Ife dalam Sugiri, 2012: 58). Pada hakekatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat maka perlu didukung oleh pemberdayaan sebagai pembangunan partisipatif dengan memasukkan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peranan serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pentingnya pemberdayaan adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalahnya secara mandiri. Menurut Sikhondze dalam Karsidi (2002:28) orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu petani agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Selain itu menurut Bahua (2015:57) pemberdayaan pertanian ditujukan kepada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better bussines),* dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya *(better living*).

Tugas dan fungsi masing masing pegawai di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bertanggung jawan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah menjalankan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan.
2. Sekretaris Dinas mempunyai fungsi dan tugas poko menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi keuangan dan perlengkapan.
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas dan fungsi pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup perencanaan dan pengendalian.
6. Kepala Bidang Pengembangan Pangan dan Holtikultura memiliki fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
7. Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai fungsi da tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
8. Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Holtikultura mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
9. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi dan tugas melaksankan seebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
10. Kepala Bidang Peternakan memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang peternakan.
11. Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak mengemban tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penyebaran dan pengembangan ternak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

12. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan.
13. Kepala Seksi Produksi Peternakan mempunyai fungsi dan tugas melasanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan.
14. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air memiliki tugas pokok merumuskan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pengelolaan Lahan dan Air.
15. Kepala seksi pengelolaan Lahan memiliki fungsi dan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air.
16. Kepala Seksi Pengelolaan Air memiliki fungsi dan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air.
17. Kepala Seksi Perluasan Areal mimiliki fungsi da tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air.
18. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil memiliki tugas pokok merumuskan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
19. Kepala Seksi Pengembangan Usaha memiliki Fungsi dan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil lingkup Pengembangan Usaha.
20. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil memiliki fungsi dan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil lingkup Pengembangan Usaha.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. *(Renstra Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018).*

Penyuluh Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluh pertanian merupakan perorangan Warga Negaa Indonesia yang melalukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Swasta, maupun Penyuluh Swadaya. (Permentan/Nomor 67/SM.050/12/2016).

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Selain itu, pola perencanaan pembangunan bukan hanya dari proses politik dan teknokratik namun juga melibatkan masyarakat didalamnya. Program pemberdayaan masyarakat sejatinya mampu mendorong kesejahteran masyarakat suatu daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan telah menyusun program yang dimuat dalam rencana strategis periode tahun 2013 hingga 2018 untuk mendukung kesehajteraan petani. Berdasarkan Peraturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menteri Pertanian RI Nomor 43 pada Pasal 15 adalah menangani masalah dan urusan pertanian dalam bentuk pelaksana penyelenggara dari pemerintah daerah meliputi tanaman pangan, holtikultura, pekebunan dan peternakan (Permentan/OT.010/8/2016).

Sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018 visi dan misi Kepala Daerah terpilih adalah memajukan perokonomian daerah yang bertumpu pada peningkatan pengelolaan ekonomi, pertanian rakyat (perkebunan, pertanian dan perikanan), perdagangan, industri dan pariwisata berdasarkan potensi setempat, maka Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun 8 program utama, yaitu:

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
2. Program peningkatan ketahanan pangan
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
7. Program peningkatan produksi hasil peternakan
8. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Berdasarkan delapan program tersebut program peningkatan kesejahteraan petani merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan upaya pemberdayaan dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian petani. Implementasi kegiatan berupa pengembangan sumberdaya tanaman pangan, holtikultura dan peternakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melalui pembinaan kelembagaan masyarakat tani, pemberian agro input dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani masyarakat tani atau petani yang ada di Kecamatan Kempas khusus nya Kelurahan Kempas Jaya dapat mengembangkan pola pikir dan pola kerja, serta mendapatkan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah melindungi petani yang berlandaskan pada undang-undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada pasal 40 bab IV tentang pemberdayaan petani, pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani
3. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
    a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
    b. Pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
    c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
6. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani

Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas 20 kecamatan diantaranya Keritang, Kemuning, Reteh, Sungai Batang, Enok, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Concong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, Gaung, Mandah, Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong dan Pulau Burung.

Kecamatan Kempas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian penduduknya masih tergolong berekonomi menengah kebawah. Sebagian besar masyarakat kecamatan berprofesi sebagai petani atau bemata pencaharian sebagai pedagang.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2016

Nama Kecamatan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Keritang	202	272	181	110
Kemuning	103	321	87	91
Reteh	238	110	198	215
Sungai Batang	97	176	72	130
Enok	284	342	253	213
Tanah Merah	384	297	124	101
Kuala Indragiri	143	243	101	130

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama Kecamatan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Concong	79	179	59	110
Tembilahan	214	244	178	131
Tembilahan Hulu	299	153	194	111
Tempuling	192	120	112	137
Kempas	141	232	98	378
Batang Tuaka	286	228	189	142
Gaung Anak Serka	133	210	332	142
Gaung	166	280	224	103
Mandah	228	338	185	228
Kateman	145	221	87	145
Pelangiran	107	201	277	156
Teluk Belengkong	68	198	144	110
Pulau Burung	81	223	63	150
Total	3590	4588	3158	3033

Sumber: *Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir, 2017*

Dalam kurun waktu tahun 2014-2016 tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya menunjukkan trend fluktuatif setiap tahunnya, lebih khususnya lagi di tingkat kemiskinan di kecamatan Kempas menunjukkan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebun tercermin dari jumlah penduduk miskin yang selalu meningkat setiap tahunnya, dari segi kuantitasnya.

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa kecamatan Kempas mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin tertinggi adalah pada tahun 2016 yaitu 378.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	361
2	Petani	10.189
3	Nelayan	147
4	Peternak	47
5	TNI	8
6	POLRI	40
7	Wiraswasta	1.435
	Jumlah	37.787

Sumber: *Statistik Kecamatan Kempas*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kempas merupakan sebahagian besar berprofesi sebagai Petani dengan jumlah 10.189 orang.

Tabel 1.3 Jenis Pertanian atau Tanaman di Kecamatan Kempas

No	Jenis Pertanian/Tanaman
1	Padi Sawah
2	Jagung
3	Kedelai
4	Kacang Tanah
5	Kacang Hijau
6	Ubi Kayu
7	Ubi Jalar
8	Kelapa
9	Pinang
10	Kopi

Sumber: *Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Inhil, 2018*

Penduduk yang berada di daerah Indragiri Hilir pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian pangan, perkebunan dan sebagian lainnya bergerak di bidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Kecamatan Kempas memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah dirinci menurut penggunaannya baik luas lahan sawah, di antaranya :

1. Pertanian Tanaman Holtikultura

   Pertanian tanaman holtikultura dirinci dari luas tanam, luas panen setara produksinya meliputi komoditi tanaman pangan, palawia, sayur - sayuran dan buah – buahan.

2. Pertanian tanaman perkebunan

   Pertanian tanaman perkebunan dirinci dari areal luas perkebunan serta produksinya meliputi komoditi tanaman kelapa, pinang dan kopi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain pertanian, kecamatan kempas juga berpotensi sebagai daerah perikanan dan perternakan. Data dapat diperoleh dari kantor Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan tabel di atas, jenis mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kempas kebanyakan berfprofesi sebagai petani padi sawah.

Tabel 1.4 Data Produktivitas Petani Padi di Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Kecamatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Keritang	39,35	39,95
Kemuning	-	21,14
Reteh	39,25	39,81
Sungai Batang	38,02	39.02
Enok	36,12	36.12
Tanah Merah	-	-
Kuala Indragiri	36,02	37.02
Concong	36,17	36.37
Tembilahan	37,11	38.19
Tembilahan Hulu	38,05	38.05
Tempuling	37,11	38.11
Kempas	39,15	39.97
Batang Tuaka	38,12	38.12
Gaung Anak Serka	36,35	36.35
Gaung	37,55	39.25
Mandah	-	-
Kateman	-	-
Pelangiran	35,43	-
Teluk Belengkong	-	-
Pulau Burung	-	-
Rata-rata	38,38	38,99

Sumber: *Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir, 2017*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa rata-rata produktivitas petani di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 adalah 38,38 ku/ha (Kuwintal/Hektar) dan meningkat menjadi 38,99 ku/ha. Diantara 20 kecamatan, kecamatan Kempas memiliki produktivitas tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 39,97 ku/ha.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecamatan kempas memiliki delapan desa/kelurahan diantaranya Bayas Jaya, Harapan Tani, Karya Tani, Kempas Jaya, Pekan Tua, Rumbai Jaya, Sungai Ara, dan Sungai Gantang.

Petani di kelurahan yang ada di Kecamatan Kempas memiliki kelompok-kelompok tani yang kemudian mendapatkan program pemberdayaan dan penyuluhan dari pemerintah. Berdasarkan data kelompok tani yang dihimpun dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri pada 8 desa/kelurahan terdapat 53 kelompok tani yang tersebar dari 3 kelompok di desa kulim jaya, 8 kelompok di desa Danau Pulai Indah, 12 kelompok di desa Harapan Tani, 6 kelompok di desa Bayas Jaya, 8 kelompok di desa Rumbai Jaya, 6 kelompok di kelurahan Kempas Jaya, 5 kelompok di desa Kerta Jaya dan 10 kelompok di desa Pekan Tua. Berdasarkan data tersebut, Desa Harapan Tani memiliki jumlah kelompok tani terbanyak di Kecamatan Kempas.

Tabel 1.5 Daftar Nama – Nama Kelompok Tani Di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA KELOMPOK TANI
1	2	3
1.	KULIM JAYA	1. SRI GEMILANG 2. RESPEN SAKTI 3. MEKAR JAYA
2.	DANAU PULAI INDAH	1. TUNAS KARYA 2. PULAI BERLAYAR 3. KWT TUNAS MUDA 4. KWT MEKAR JAYA 5. BINA USAHA 6. SUMBER GUNA 7. PRIATIM 8. MARGO TIRTO
3.	HARAPAN TANI	1. SUKA SARI 2. SINAR DAMAI 3. SENANG HATI 4. SIDO MULYO 5. SIDO RUKUN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		6. MARTAPURA 7. KARYA BARU 8. BONE PUTERA 9. GABUNGAN 10. HIDAYAT 11. BERINGIN 12. BINA TANI
4.	BAYAS JAYA	1. SUMBER REZEKI 2. MAKMUR 3. SIDO MULYO 4. SRI SADENE 5. KARYA TANI 6. KARYA BARU
5.	RUMBAI JAYA	1. SARWO DADI 2. SUKA BANGKIT 3. TRI SAKTI 4. KARYA SAKTI 5. TANI MAKMUR 6. SRI DADI 7. NGUDI MULYO 8. TUNAS MUDA
6.	KEMPAS JAYA	1. INDRA JAYA 2. KARYA JAYA 3. SEMOGA JAYA 4. MAJU JAYA 5. SETIA KARYA 6. SINAS PRAGOLO 7. MAKMUR
7.	KERTA JAYA	1. BARAKOH 2. MAJU JAYA 3. MAURAI 4. PANCA BINA TANI I 5. PANCA BINA TANI II
8.	PEKAN TUA	1. AMPERA 2. BAHAGIA 3. HARAPAN BARU 4. KARYA BARU 5. SAHABAT KAMPUNG 6. SETIA BUDI 7. SINAR HARAPAN 8. SINAR TANI 9. TANJUNG HARAPAN 10. TRI USAHA RESPEN

Sumber: *Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Inhil, 2018*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Data observasi awal yang didapatkan peneliti dari Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Peternakan terdapat beberapa program dan kegiatan serta target kinerja program yang telah dijalankan dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Kegiatan dalam Program Peningktan Kesejahteraan Petani yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura periode 2013-2018

No	Kegiatan	Indikator Sasaran	Bentuk Kegiatan	Ketercapaian		Anggaran
				Terlaksana	Belum terlaksana	
1	Peningkatan kemampuan lembaga petani	– LM3	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis		√	492.803.000
		– UPJA		√		
		– UP3HP			√	
		– SMD			√	
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pembinaan dan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (padi dan jagung)	Pemanfataan pekarangan untuk pengembangan pangan	√		73.068.000
			Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	√		463.615.000
			Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	√		96.165.000
			Pengembangan pertanian pada lahan kering	√		390.788.000
			Pengembangan perbenihan/ perbibitan	√		126.785.000
			Peningkatan mutu dan keamanan pangan	√		44.745.000
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	√		255.743.000
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	√		15.100.000

Sumber: *Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Inhil, 2018*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa terdapat dua kegiatan utama dalam program peningkatan kesejahteraan petani yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Indragiri Hilir namun terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana yaitu kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani LM3 (Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat), UP3HP (Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian) dan SMD (Swadaya Masyarakat Desa), namun hanya kegiatan kelembagaan UPJA saja yang terlaksana. Berdasarkan Standar Pelayanan yang diterapkan, UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan) yang dikembangkan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan mewajibkan petani untuk membuat setidak-tidaknya dua langkah untuk dapat menumbuhkan UPJA yaitu:

1) Mengidentifikasi wilayah dan jumlah alsintan yang tersedia
2) Melakukan pengorganisasian UPJA (membentuk struktur organisasi) berupa manajer, administrasi, dan operator.

Tabel 1.6 Daftar Bantuan dan Hibah Barang/ Jasa Kepada Kelompok Tani Di Kelurahan Kempas Jaya

No	Jenis Bantuan	Tahun	Volume
1	Vertical Drayer Kapasitas 10 Ton	2018	1 unit
2	Combein Hervester Kapasitas Sedang	2018	3
3	Power Threser	2018	5
4	Pupuk NPK	2018	400 Kg
5	Pupuk Organik	2018	800 Kg
6	Herbisida	2018	10 Liter
7	Combein Hervester Kapasitas Besar	2019	2
8	Rice Milling Unit Kapasitas 1.5 Ton	2019	1
9	Power Threser	2019	13
10	Penangkar Benih	2019	10 Hektar
11	Benih padi	2019	25 Kg/ Perhektar
12	Pupuk NPK	2019	50 Kg/ Perhektar

Sumber: *Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Inhil, 2020*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain mendatangi Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Indragiri Hilir Penulis telah melakukan observasi awal di Kecamatan Kempas dan mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya:

1. Kurangnya Pelatihan Keterampilan ataupun bantuan pembibitan pada lahan masyarakat tani di Kelurahan Kempas Jaya.
2. Belum maksimalnya usaha memampukan petani padi di Kelurahan Kempas Jaya.
3. Penggunaan mesin untuk produksi tani sangat rendah, sehingga pekerjaan petani membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam penyelesaian produksi tani.
4. Pemahaman tentang bibit dan teknik penanaman yang lebih modern kurang dikuasai oleh Petani, sehingga petani hanya menggunakan cara-cara konvensional dalam mengembangkan usaha tani nya.
5. Masyarakat tidak mengetahui dan cenderung tidak ikut serta dalam sosialisasi program Pemberdayaan Masyarakat Tani yang diadakan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tapi kenyataanya kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Kempas tidak juga mengalami perubahan yang signifikan. Padahal Dinas Pertanian Holtikultura dan Peternakan telah melaksanakan program pemberdayaan petani sejak 2013 namun angka kemiskinan terus meningkat terutama pada tahun 2016. Dengan adanya program peningkatan kesejahteraan petani diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Beberapa permasalahan tersebut mengindikasikan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan telah dikemukakan pada latar belakang masalah serta dikuatkan pula dengan keterangan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana Pemberdayaaan Petani Melalui program Peningkatan Kesejahteraan Petani oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?
b. Apa saja faktor-faktor penghambat Pemberdayaaan Petani Melalui program Peningkatan Kesejahteraan Petani oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di uraikan maka penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui Pemberdayaaan Petani Melalui program Peningkatan Kesejahteraan Petani oleh Dinas Tanaman Pangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Holtikultura dan Peternakan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pemberdayaaan Petani Melalui program Peningkatan Kesejahteraan Petani oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Kegunaan penelitiaan

a. Teoritis

Aspek teoritis yang diharapkan dalam seluruh rangkaian kegiatan penelitian adalah dapat mengembangkan ilmu pemerintahan dalam menjawab permasalahan yang ada di Masyarakat di lihat dari pendekatan atau perspektif pemberdayaan.

b. Praktis/aspek guna laksana

1. Bagi Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tentang Pemberdayaaan Petani Melalui program Peningkatan Kesejahteraan Petani oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan kajian untuk turut serta mengawasi dan memberikan gambaran pentingnya Pemberdayaaan Petani Melalui program Peningkatan Kesejahteraan Petani oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan Peternakan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalagan penulis lainnya. Yang akan melaksanakan penelitian dan kasus yang sama pada tempat yang berbeda.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep atau teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang di kemukakan diatas.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2011:7).

Ilmu pemerintahan berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan pemerintahan. Ilmu bersifat kongkrit, sehingga dapat diamati, dipelajari dan diajarkan serta teruji kebenarannya, teratur, bersifat khas atau khusus dalam arti mempunyai metodologi, objek, sistematika dan teori tersendiri. Lebih lanjut, ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Ilmu pemerintah sebagai seni karena ada banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintah mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun forma, bersifat universal dan sistematik (Inu Kencana Syafie, 2011:12).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah (Poeljo dalam Ndraha, 2011: 15).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legeslatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. (Inu kencana Syafie, 2011:15)

Menurut Ndraha (2011: 7) Ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil.

Menurut Syafiie (2011: 8) ilmu pemerintahan adalah ilmu mempelakari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2011: 16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagi ilmu pengetahuan yang bertuajuan untuk memimpin hidup

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Labolo (2006:2) ilmu pemerintahan mengkontruksi dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari masnusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Gaffar (dalam Ndraha 2010: 16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

2. Konsep Pemerintahan

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat (Stephen P.Robbins, 2006:13). Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan (*unitary*) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia telah melakukan otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang unik berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya pasca reformasi (Busrizalti, 2013:34).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dengan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikir kata "perintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong (dalam Syafiie, 2011: 31) Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif dan Keuangan. Kemudian Juga di Ilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Menurut Samuel Edwar Finer (Syafiie, 2011: 32) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan berlansung (*state*), pejabat yang memrintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Budiarjo (2009:21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisi yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara, Rakyat atau Penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk menjadikan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Rasyid (dalam Labobo 2006: 25) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut syafiie (2011: 20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur ayitu ada dua pihak yang memiliki 4 unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak yang terkandung tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memrintah memiliki wewenang, dan pihak yang lain diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebgaimana dimaksud dalam undang-uandang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah daerha adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah (UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 dan 3).

Menurut Subakti (1999: 168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istlah itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau di tinjau dari tiga aspek:

a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlansakan pada dasar Negara.
b. ditinjau dari aspek struuktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
c. ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan keweanngan Negara.

Didalam ilmu pemerintahan maksud dengan pemerintah ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berda setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan/Desa.

Jadi berdasarkan definisi di atas, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu sebagai pelaksana semua kegiatan yang mengatur jalannya pemerintahan yang ada di daerah berdasarkan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Sedangkan menurut Misdayanti dan R.G Kartasapoetra (1993:17) fungsi pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Fungsi Otonom

   Fungsi otonom dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Fungsi Pembantu

   Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

3. Fungsi Pembangunan

   Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Fungsi Lainnya

Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan Wilayah

b. Pembinaan Masyarakat

c. Pemberian pelayanan, pemeriharaan serta perlindungan kepentingan umum (Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993:20-27)

Jadi berdasarkan fungsi pemerintah daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan segala urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya dengan meningkatkan laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat membina wilayah dan membina masyarakat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah adalah Gubenur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan menetapkan pembentukan kedudukan, tugas dan fungsi serta stuktur organisasi perangkat daerah.

3. Konsep Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Tugas pemerintah menurut Kaufman dalam Thoha adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Miftah Thoha, 2003:71).

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Rasyid, 2000:59). Siagian P. Sondang (1987:101) mengatakan ada empat fungsi pokok pemerintah, yaitu: Pertama, memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*), Kedua, pertahanan dan keamanan, Ketiga, diplomatik, dan Keempat, perpajakan.

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 76) pemerintahan memiliki dua fungsi dasar yaitu:

a. Fungsi primer atau disebut frngan fungdi *pelayanan* yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang di perintah, jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah melaksanakan *Pembangunan*. Jika rakyat meras tertindas, tidak berdaya menentukan masa depan nya maka pemerintah melakukan program *Pemberdayaan.*

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu:

a. Fungsi pembangunan
b. Fungsi pemberdayaan
c. Fungsi pelayanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Ndraha (2003: 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu:

a. Fungsi Pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dnegan membuat peraturan perundang-undnagan yangakan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang diseoakati oelh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah saldah hak yang dapat dilakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibenbani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan ini juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimall jika pelaksanannya cukup tanggung dan berbobot.
c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup bergam, dengan fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam labobo 2006: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

1. Fungsi primer (pelayanan)
   Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hankam, layanan civil, dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
   Fungsi sekunder (pemberdayan) adalah fungsi pemerintah sebgai provider kebutuhan dn tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena msih lemah dan tidak berdaya termasuk penyediaan dan mebangunan sarana dan prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Laboho, 2006: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

1. Fungsi pengaturan
   Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi-fungsi dengam segala bentuknya dimaksdukan debagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlansungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan social yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Fungsi pelayanan
   Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan menambahkan keadilan dalam masayrakat.
3. Fungsi pemberdayaan
   Fungsi pemberdayaan adalah mendorong keamandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarkat.
4. Fungsi pembangunan
   Adanya pemberdayaan, maka secara tidak lansung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang di laksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secra perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang di uraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menerapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

4. Konsep Manajemen

Definisi konsep manejemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukaan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009;16) menurutnya manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 fungsi utama: Perencanaan, Pembuatan keputusan, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengontrolan dan Penyempurnaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Manajemen sebagai suatu seni (*Art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan, tetapi banyak para pendapat dan para ahli berbeda pendapat tentang manajemen. Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu :

1. Kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat di pengaruhi dan di dukung oleh sifat-sifat dan bakat.
2. Dalam proses pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup yang menentukan keberhasilan.

Menurut Feriyanto dan Shyta (2015;4) Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai proses kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan menejerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Manullang (2002 ; 3), Bila mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses,kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang orang yang melakukan aktivitas manajemen,dan ketiga manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Budiyono (dalam Terry, 2004;7) mendefinisikan manajamen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut pendapat Siagian (2003;5), mengatakan, manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan manajemen, juga di temukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep menejemen.

5. Konsep Pemberdayaan

5.1 Pemberdayaan Sebagai Strategi untuk Menanggulangi Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya mencakup persoalan materi saja, namun juga masalah-masalah non ekonomi. Karena sifatnya yang multidimensi, maka kemiskinan tidak hanya menyangkut kesejahteraan sosial. Adapun definsi kemiskinan dari beberapa dimensi, dikemukakan dibawah ini (Nugroho dalam Atma Ras, 2013:57).

Berdasarkan dimensi dari kemiskinan hakekatnya sebagai gambaran bahwa sumber awal masalah kemiskinanan adalah kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan diasumsikan sebagai sumber maslah utama terjadinya kemiskinan yang kemudian membawa implikasi pada faktor-faktor pendukung kemiskinan yang lain pendukung kemiskinan yang lain ketidakberdayaan pada aspek ekonomi ditandai oleh terbatasnya aset khususnya faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang rendah serta kemampuan yang rendah dalam merespon peluang ekonomi (Atma Ras, 2013).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masyarakat yang tidak berdaya, warga miskin dan perempuan, harus dimampukan dengan memberikan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mendapat sumber daya dan merubah pola pikir mereka sehingga menjadi masyarakat yang berdaya melalui proses pemberdayaan. Di lain pihak kelompok yang selama ini mempunyai sumber kekuasaan tadi (kelompok dominan) harus mau membagikan pengetahuan, informasi, dan sumber dayanya bagi kelompok yang lain (Iskandar, 2010:3).

Kepedulian, sikap mau berbagi, keikhlasan menjadi landasan untuk membangun kebersamaan (solidaritas sosial) yang menjadi kontrol/landasan dari terciptanya ikatan ikatan yang didasarkan saling percaya (modal sosial). Dengan demikian sikap mental dan pola pikir kita menjadi bagian yang utama untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Terdapat tiga strategi pemberdayaan yang umum dipahami atau dilaksanakan (Nugroho dan Wrihatnolo, 2007:119), yaitu:

1) Pemberdayaan yang hanya berfokus pada pemberdayaan yang hanya berkutat pada "daun" dan "ranting" atau pemberdayaan konformis. Oleh karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur politik yang ada sudah dianggap *given*, maka pemberdayaan masyarakat hanya dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan daya adaptasi terhadap struktur yang sudah ada. Bentuk aksi strategi ini adalah mengubah sikap mental masyarakat yang tidak berdaya dan pemberian bantuan, baik modal maupun subsidi.
2) Pemberdayaan yang hanya terfokus di "batang" atau pemberdayaan reformis. Model ini tidak mempermasalahkan tatanan sosial, ekonomi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

politik dan budaya yang ada. Tetapi dipersoalkan adalah praktek dilapangan atau pada tingkat kebijakan komparasional. Dengan demikian, pemberdayaan difokuskan upaya peningkatan kinerja operasional dengan membenahi pola kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan.

3) Pemberdayaan yang berfokus pada "akar" atau pemberdayaan struktural. Bahwa ketidakberdayaan masyarakat disimpulkan sebagai akibat dari struktur sosial, politik, budaya dan ekonomi yang kurang memberikan peluang bagi kaum lemah. Dengan demikian maka pemberdayaan dinyatakan harus dilakukan melalui transformasi struktural secara kehidupan yang ada. Konsep yang ketiga ini disebutkan pula sebagai *critical paradigm.*

5.2 Pemberdayaan

Menurut Rahman (2016:192) bahwa Pemberdayaan sebagai suatu proses menuju perubahan memerlukan berbagai cara dan inovasi yang mampu memberikan sumbangsih pemikiran/ide, produk, gagasan, metode peralatan atau teknologi ke arah perubahan. Oleh karenanya pemberdayaan sebagai suatu proses bukanlah suatu cara yang sederhana. Untuk mencapai partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan banyak hal yang mendukungnya, mulai dari sumberdaya manusia yang tersedia, kelembagaan yang ada ditingkat desa dan peran-peran yang dijalankan oleh pemerintah, aktivis LSM, tokoh masyarakat dan fasilitator.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Adam Ibrahim dan Juni Pranoto (2011; 60) dalam bukunya "Revitalisasi Administrasi Pembangunan" pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu - individu yang mengalami masalah kemiskinan.

> Pemberdayaan merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang merek miliki, adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 2010).

Menurut kamus Besar Indonesia defisi pemberdayaan adalah upaya memuat Sesuatu berkemampuan /berkelanjutan. Upaya – upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan umumnya mempunyai arah yang sama atau paling tidak mirip satu sama lain. Langkah itu pada dasarnya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan terus-menerus. Upaya pemberdayaan tidak terlepas dari langkah partisipasi, tanpa partisipasi upaya yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak, atau belum mampu mandiri suatu kelompok masyarakat (Manuwoto 1998: 15)

Pemberdayaan masyarakat juga dipandang sebagai proses yang lebih bernuansa humanis, sebagaimana dinyatakan oleh Kusnaka (dalam Hikmat , 2001: 11) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Noe Etal (dalam A. Usmara, 2002: 123) pemberdayaan adalah merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut : (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Prijono dan Pranarka, 1996:3). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996:4), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Mubyarto (1998:45) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai sosial budaya. Berdasarkan uraian – uraian tersebut, tampak bahwa hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan upaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan – pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan local itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Disamping itu, pemberdayaan juga dikatakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip dasar menurut (Ife 1995: 178), yaitu:

1. Prinsip partisipasi

   Bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaan harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarkat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan program . pelaksaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil .

2. Prinsip sustainability

   Mengarah hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan hendaknya dapat dilestarikan masyarakat sendiri sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menciptakan pemupukan modal (capital accumulation) dalam wadah social ekonomi setempat.

3. Prinsip demokratis

   Menghendaki agar rakyat dalam kegiatan perberdayaan perlu diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada dalam hal untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang mereka miliki.

4. Prisip transparansi

   Mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan itu melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan sumberdaya- sumberdaya, terutama keuangan harus dilakukan secara transparan (terbuka) agar semua pihak ikut memantau dan mengawasi penyaluran dan mulai dari pihak sponsor sampai pada masyarakat sasaran.

5. Prinsip akuntabilitas

   Mengharuskan pengelolaan keuangan harus dapat dilakukan oleh masyarakat dan peaksana program secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan.

6. Prinsip desentralisasi

   Dimaksudkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bukan lagi dilakukan secara terpusat atau tersentralisasi dengan petunjuk dan aturan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah.

7. Prisip *profitable*

   Memberikan pendapat yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable).

8. Prinsip *acceptable*

   Mengarahkan agar bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran hendaknya dikelola sedemikian rupa agar mudah diterima dan disayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana serta pengelola.

9. Prinsip *replicable*

   Mengisyaratkan agar pengelola program pemberdayaan agar dapat memperhatikan aspek pengelolaan dana dan pelestrian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkungan hidup yang lebih luas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1995: 84) pemberdayaan memiliki tahapan- tahapan upaya pemberdayaan. Dengan indikator :

1. Pemungkinan (*enabling*), yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat *cultural* dan *structural* yang menghambat.
2. Penguatan (*empowering*), yakni memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
3. Perlindungan (*protecting*), harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan yang lemah, oleh karena kekurangberdayaan mengahdapi yang kuat.

Menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007:2), ada tiga tahapan proses pemberdayaan. Proses pertama, penyadaran dengan target, yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka punya hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsipnya, membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. Proses selanjutnya adalah diberikan daya kuasa yang bersangkutan agar mampu terlebih dahulu. Proses pembentukan kapasitas ini terdiri atas manusia, organisasi, dan sistem nilai. Selanjutnya, target diberi daya, kekuasaan, otoritas, dan peluang. Sebagaimana dilakukan beberapa komunitas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

desa yang sukses memberdayakan diri sendiri, mereka aktif memanfaatkan peluang dan berdaya atas diri mereka sendiri tanpa bergantung pada pihak mana pun. Mereka berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan komunitas dan mempunyai perasaan bermasyarakat.

5.3 Pemberdayaan Masyarakat Petani

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan kelembagaan petani meliputi : (1) Petani sub sisten tradisional yang telah berubah menjadi petani moderen berwawasan agribisnis difasilitasi untuk membentuk kelembagaan petani melalui proses partisipatif dan "*bottom-up*"; (2) Untuk membentuk kelembagaan petani yang kokoh, perlu disusun suatu instrumen pemberdayaan kelompok tani. (3) Instrumen pemberdayaan kelompok tani yang perlu dipertimbangkan antara lain : (a) Adanya interest/kepentingan yang sama di antara petani dalam kelompok; (b) Adanya jiwa kepemimpinan dari salah satu petani di dalam kelompok; (c) Adanya kemampuan manajerial dari petani di dalam kelompok; (d) Adanya komitmen dari petani untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membentuk kelembagaan petani; (e) Adanya saling kepercayaan di antara petani di dalam kelompok. (Zulkifli Sjamsir, 2017:71)

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

6. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993:28) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat indicator yaitu:

a. Rasa aman
b. Kesejahteraan
c. Kebebasan
d. Jati diri

Badan Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini adalah:

1. Hikatul Fauziyah dan Agus Satmoko Adi (2015) berjudul Peranan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Petani Agribisnis Desa Medang Kabupaten Lamongan. Hasil penelitan ini yaitu bahwa peranan pemerintah desa kepada kelompok tani melalui klinik konsultasi agribisnis (KKA). Program kegiatan pemerintah desa pada kelompok tani meliputi : Pemberian kemandirian melalui keaktifan dan kreatifitas petani dalam usaha agribisnis, Pemberian informasi melalui sosialisasi dalam rapat dan berbagai cara seperti tatap muka langsung *(face to face),* SMS, blog, brosur dan lain sebagainya, Pemberian motivasi melalui berbagai kegiatan motivasi dan kunjungan kerja dari berbagai dinas pertanian, partai politik dan kelompok tani dari desa-desa lain, Pemberian kerja sama melalui berbagai kerja sama dengan berbagai tempat produksi, pasar, KUPT kecamatan, bank jatim, dan penyedia bibit-bibit pertanian, Pengelolaan hasil produksi melalui pembibitan, penjualan dan pemasaran hasil produksi ke pasar dan para tengkulak. Selain itu pemerintah desa juga terlibat dalam pengelolaan pemasukan kas desa yang diperoleh dari usaha agribisnis dalam pemasukan anggaran pendapatan belanja desa (APB-Des).
2. Ravik Karsidi. (2002) berjudul pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengangunan ekonomi yang sentralistik dan sangat kapitalistik telah melembaga sangat baik secara ekonomi, politik maupun budaya, sehingga tidak mudah untuk menjebolnya. Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil agar mampu menjawab

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tantangan era global membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, pelaku ekonomi, rakyat, lembaha pendidikan, organisasi profesi, dan organisasi non pemerintah lainnya.

3. Rachmad (2016) yang berjudul Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program PDPM dari hasil olahan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan sesuai teori van meter dan van horn yaitu komunikasi tidak berjalan dengan efektif karena masih kurangnya sosialisasi PDPM sehingga masyarakat kurang mengetahui program tersebut, disamping itu tidak didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya finansial yakni memiliki kapasitas atau skill dalam mengimplekentasikan kegiatan program itu sendiri, karakteristik agen pelaksana program PDPM namun demikian dalam implementasinya memberikan dampak yang positif/baik dalam memberikan dampak yang positif/baik dalam menciptakan proses-proses tridaya dalam pembangunan masyarakat, seperti peningkatan sarana prasarana, perubahan pada bidang sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat melalui program daerah pemberdayaan masyarakat.

Penelitian terdahulu diatas merupakan salah satu faktor pembanding yang membedakan antara penelitian yang di teliti oleh peneliti dengan penelitian terdahulu diantaranya merupakan; judul penelitian, lokasi penelitian, teori yang digunakan dalam penelitian serta hasil penelitian yang diteliti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka pemikiran tentang Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

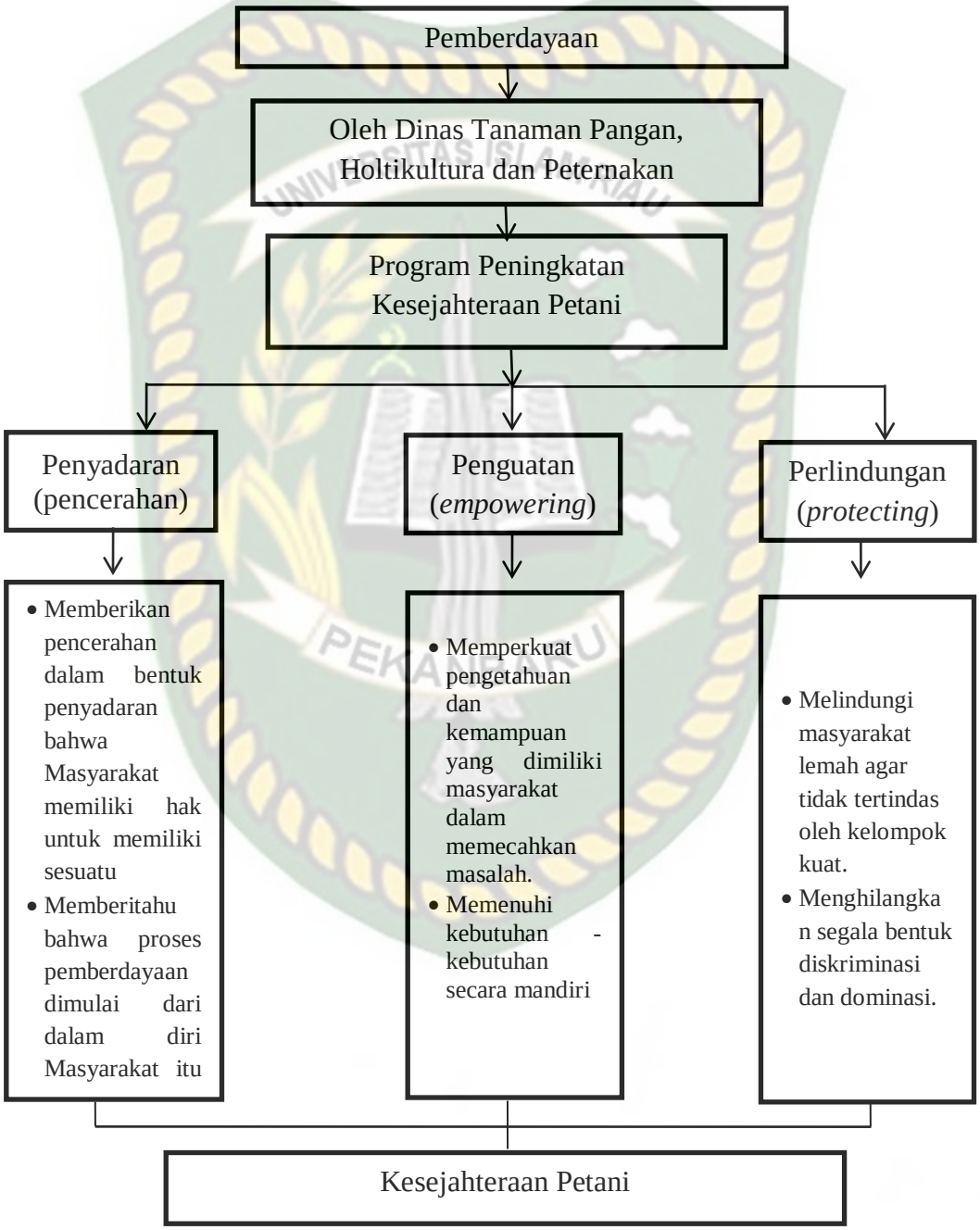

Sumber*: Modifikasi Penulis, 2019, dari Teori Ginanjar Kartasasmita, 2000 dan Wrihatnolo dan Dwijowijoto 2007*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa Pemberdayaan dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan tahapan indikator yaitu Penyadaran, Penguatan dan Perlindungan yang memiliki output kesejahteraan petani.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, mkaa perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan variable tersebut :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan menetapkan pembentukan kedudukan, tugas dan fungsi serta struktur organisasi perangkat daerah.
2. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah membantu Pemerintah Daerah yaitu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Petani dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kempas Jaya yang akan diberikan pemberdayaan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani adalah salah satu program pemberdayan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan kesejahteraan petani
5. Pemberdayaan adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan social yang berkelanjutan.
6. Penyadaran adalah masyarakat yang diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka punya hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsipnya, membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka.
7. Penguatan (*empowering*) yakni dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya secara mandiri.
8. Perlindungan (*protecting*) adalah harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan lemah, sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Ada pun konsep variabel berikut ini:

Tabel II.1: Konsep Operasional dan Operasional Variabel Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

Konsep	Variabel	Indikator
1	2	3
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu dengan hanya kemampuan sendiri melepaskan dari kemiskinan dan keterbelakangan (Ginanjar Kartasasmita, 1995; 84)	Proses atau Tahapan Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan kempas kabupaten Indragiri Hilir	a. Penyadaran 1) Memberikan pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa Masyarakat memiliki hak untuk memiliki sesuatu 2) Memberitahu bahwa proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri Masyarakat itu sendiri. b. Penguatan (empowering) 1) Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah . 2) Memenuhi kebutuhan - kebutuhan secara mandiri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3
		c. Perlindungan 1) Melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. 2) Menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi.

Sumber: *Olahan Peneliti, 2018*

F. Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan proposisi Penelitian. Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan baik apabila adanya tahapan pemberdayaan berupa Penyadaran, Pemungkinan (*enabling*), Penguatan (*empowering*), dan Perlindungan (*protecting*).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian ini.

Adapun teknik analisa yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Menurut Sugiyono (2002:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. Selain itu, Moelong Lexy (2007:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Unit Analisis Penelitian

Unit analisis adalah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis merupakan suatu penelitian yang dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya.

Dalam penelitian ini analisisnya yakni berupa pemberdayaan petani melalui program kesejahteraan petani yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. Program kesejahteraan petani ini terdapat dua kegiatan utama yaitu peningkatan kelembagaan petani dan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian.

Dalam penelitian ini peneliti menulis dari semua data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dilakukan, dan penulisan berbentuk uraian terperinci, kemudian di reduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok untuk di fokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, yang terkait dengan masalah penelitian. Ketika semua data terpilih, maka kemudian peneliti berusaha untuk mengambil kesimpulan dari proses tersebut. Tetapi kesimpulan yang ada masih di verifikasikan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2002: 65).Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemberdayaan petani melalui program peningkatan kesejahteraan petani oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Informan dalam penelitian ini adalah

Tabel III.1: Informan Penelitian

No	Nama	Kedudukan	Pendidikan	Keterangan
1	Ir. Kuswari MP	Kepala Dinas	S2	Pemerintah Daerah
2	Dewi Kanova	Sekretaris	S1	Pemerintah Daerah
3	Benny Murdhani SP	Kasubag Perencanaan dan Pengendalian	S1	Pemerintah Daerah
4	Dirhamsyah. S. ST	Kasi Tanaman Pangan dan Holtikultura	S1	Pemerintah Daerah
5	Syamsudin SP	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluh	S1	Pemerintah Daerah
6	Pak Ali SP	Koordinator Kecamatan Kempas	S1	Pemerintah Daerah
7	Suristo, SP	Penyuluh Pertanian Di Kelurahan Kempas Jaya	S1	Pemerintah Daerah
8	Asep Hermawan	Ketua Gapoktan Di Kelurahan Kempas Jaya	SMA	Petani
9	Swi Suprayetno	Kelompok Tani Makmur Di Kelurahan Kempas Jaya	SMA	Petani
10	Suhari	Kelompok Tani Setia Karya Di Kelurahan Kempas Jaya	SMA	Petani

Sumber*: Data Olahan (2019)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54).

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2002:62). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara/interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber (Arikunto, 2010:198). Menurut Harrison (2007:104) secara khusus, wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik pada penelitian, wawancara juga merupakan teknik yang baik untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya. Dengan penyusunan daftar pernyataan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepala Dinas, Sekretatis/Subag., Bidang Pemberdayaan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini Usman, 2000:54). Observasi ditujukan untuk mendapat informasi awal dan data sekunder yang berhubungan erat dengan objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan adalah dengan membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengetahui Pemberdayaan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hilir.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 2010:165). Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa dokumen, peraturan yang berlaku, landasan hukum dan lain-lain yang dapat dijadikan bukti dalam penelitian.

F. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah *model interaktif* (Miles dan Huberman, 1992) dan Burhan Bungin (2003:70). Analisis interaktif ini merupakan siklus dan interaktif. Artinya peneliti dalam melakukan proses penelitian siap bergerak pada empat sumbu yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesimpulan atau verifikasi. Proses ini bersifat berulang dan berlanjut hingga selesai. Adapun penjelasan dari proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

   Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi data

   Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display data atau Penyajian Data

   Display data / penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

   Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

G. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penulis memilih lokasi di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut untuk pemberdayaan di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1) Angka kemiskinan di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir tergolong tinggi;
2) Mayoritas masyarakat adalah petani yang membutuhkan program pemberdayaan;
3) Ingin melihat lebih dekat dan secara nyata program pemberdayaan di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti. Data interview diperolah berdasarakan Tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada Informan yaitu : Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kasubag Perencanaan dan Pengendalian, Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil, Penyuluh Pertanian, Gapoktan Di Kelurahan Kempas Jaya dan Kelompok Tani Di Kelurahan Kempas Jaya yang berkaitan dengan Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan kesejahteraan Petani oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya dan data yang yang diperoleh dari perpustakaan seperti, Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen dokumen yang berupa data yang diolah dari objek penelitian. Yaitu : Program yang telah dijalankan, data lokasi penelitian, jumlah kelompok tani, Visi – misi Pemerintahan kabupaten Indragiri Hilir, Sejarah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabuapten Indragiri Hilir, Sejarah Kelurahan Kempas Jaya, Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabuapten Indragiri Hilir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

I. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2019.

Tabel III. 1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar Up																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Daftar Wawancara																				
5	Rekomendasi Survei																				
6	Survei Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konfehensip																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggadaan Skripsi																				

Sumber modifikasi penulis 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

1. Visi – Misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Setelah dirasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

VISI DAN MISI :

VISI :

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan *"INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025"*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yagn sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensial.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosia budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah, dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang.

Disamping indikator - indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah.

Suatu kemajuan yang hebat (GEMILANG) akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis dan konseptual antara kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

MISI :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing daerah : adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demoktratis : adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konsitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat fan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam mempaerjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasanan kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, kinsisten, serta tindak diskriminatdi.
3. Mewujudkan pemerataaan pembangunan dan hasil-hasilnya : adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesbilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.

4. Mewujudkan suasana aman, dama, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya : adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti asepek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kurtural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asingyang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.
5. Mewujudkan daerah yagn memiliki peran penting pada tingkat tegional nasional dan internasional : adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenergaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan infentitas dan integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat indragiri hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

2. Potensi Alam Kabupaten Indragiri Hilir

LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan peraiaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki ”Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “NEGERI SERIBU JEMBATAN” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

0 36´ Lintang Utara

1 07´ Lintang Selatan

104 10´ Bujur Timur

102 30´ Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.

Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Propinsi Jambi .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di penggunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok.

Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Pertanian

Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang sangat strategis, Indragiri Hilir terus memacu diri mengembangkan kawasannya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Riau dan pusat pertumbuhan kebudayaan ekonomi Riau dan Pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.

Sebagai Kabupaten tumbuh dan berkembang pada gerbang selatan provinsi Riau yang bersebelah dan menjadi hinderland Malaysia dan Singapura, serta selangkah dari pusat pertumbuhan Batam dan Bintan, masuknya investor. Potensi sumber daya alam Indragiri Hilir harus dikelola industri-industri hilir yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Untuk itu pemerintah Kabupaten harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna memudahkan hadirnya para investor lokal, regional bahkan intenasional.

Pemerintah Indragiri Hilir akan memberikan pelayanan terbaik yang diperlukan oleh calon penanam modal itu. Salah satu diantaranya adalah memberikan pelayanan terpadu satu pintu yang di kenal sebagai One Door Service. Dengan One Door Service calon investor akan mendapat pelayanan memuaskan, sejak dari informasi peluang bisnis. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta menyimpan berbagai potensi ekonomi, Indragiri Hilir menjanjikan banyak kemungkinan pada masa depan. Didukung letak geografis yang strategis serta ditunjang tersedianya berbagai infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang positif daerah ini merupakan lahan investasi yang layak diperhitungkan dalam era ekonomi global.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah investasi, pemerintah daerah telah membangun berbagai infrastruktur terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Potensi lahan basah (pasang surut) untuk persawahan di Kabupaten Indragiri Hilir seluas ± 57.642 ha, yang belum dimanfaatkan seluas ± 23.965 ha dan yang sudah dimanfaatkan seluas ± 33.677 ha. Dengan produksi padi 127.369,48 GKG. Untuk potensi pengembangan lahan kering seluas ± 169.000 ha, yang belum dimanfaatkan seluas ± 84.648 ha dan yang telah dimanfaatkan seluas ± 74.136 ha, dipergunakan untuk pengembangan palawija dengan luas areal ± 13.476 ha, dengan produksi 1.448 ton dan buah-buahan dengan luas ± 1.247 ha, dengan produksi 27.958,04 ton, sayur-sayuran dengan luas ± 1.247 ha, dengan produksi 1.448 ton dan buah-buahan dengan luas ± 5.320,80 ha, dengan produksi 82.105,38 ton.

Perkebunan

Kebun Kelapa identik dengan Indragiri Hilir dan Indragiri Hilir adalah sentra kebun kelapa paling luas di Indonesia, menjadi hamparan kebun kelapa dunia. Di sini pohon-pohon kelapa tumbuh dengan suburnya dari lahan-lahan yang semula hutan rawa-rawa.

Sebagai negara pemilik kebun kelapa terluas di dunia, Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektare yang tersebar di kepulauan kelapa. Wilayah Kateman atau yang lebih di kenal dengan sebagai Sungai Guntung adalah Kecamatan yang memiliki kebun kelapa paling luas disana. Kebun-kebun ini adalah milik PT. Pulau Sambu, sebuah perusahaan agrobisnis yang memiliki kebun sekaligus pabrik minyak kelapa di Indragiri Hilir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kebun kelapa di sana dikelola secara profesional. Hamparan kebun itu bukan hanya subur, produktif dan dihandalkan, tetapi juga indah mengasyikan. Kebun Kelapa Guntung sudah menjadi objek wisata atau agrowisata yang luar biasa. Dan inilah kebun kelapa raksasa dan daya tarik wisata yang tiada tara. Kabarnya disekitar pantai akan dibuat badan jalan, sepanjang tepi kanal dan tanggul akan dapat dilalui kendaraan.

Yang kedua adalah perkebunan kelapa sawit, indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia sebagian besar kelapa sawit indonesia berasal dari perkebunan di indragiri hilir, karena semakin murahnya harga kelapa (biasa) di indragiri hilir petani kelapa di inhil banyak yang beralih menjadi petani kelapa sawit hasilnya inhil sekarang menjadi daerah yang terkenal dengan kelapasa sawitnya.

Panjang kanal disambung-sambung akan mencapai 32.000 kilometer Luar biasa! itulah potret sekilas Negeri Sejuta Kelapa di Negeri Seribu Parit ini. Selain kelapa sebagai hasil bumi kabupaten ini, kelapas sawit juga menjadi sumber daya alam terdapat banyak di barat kabupaten ini seperti di kecamatan tempuling, enok, kempas jaya dan teluk kiambang salag satu desa penghasil sawit terbesar di kabupaten ini.

Peternakan

Potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk usaha ternak pada sub sektor peternakan seluas ± 225.863 ha, dengan daya tampung ± 902.452 ekor dipergunakan untuk ternak besar (sapi). Adapun jumlah ternak besar saat ini ± 11.678 ekor dan ternak kecil (kambing dan domba) ± 30.862 ekor, sedangkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk kebutuhan daging di Kabupaten Indragiri Hilir ± 2.995.744 ton dan kebutuhan telur ± 1.671.054 kg.

Yang mampu dihasilkan usaha peternakan untuk daging ± 45% dan untuk telur ± 35.31%, maka peluang potensi pengembangan pasar lokal untuk daging dan telur sangat cukup terbuka.

Perikanan

Program kerjapembangunan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir telah mengacu pada 4 (empat)usaha pokok, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi,serta terus meningkatkan peranan perusahaan swasta dalam dunia perikanan dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan nelayan/petani ikan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha, memenuhi kebutuhan konsumen ikan dalam negeri, penyediaan bahan baku industri dan peningkatan ekspor. Disamping itu sekaligus dapat diarahkan untuk pemerataan kesempatan berusaha serta penyerapan tenaga kerja dengan tetap menjaga sumber daya dan lingkungan hidup perairan.

Mengacu kepada tujuanpembangunan perikanan Riau dengan memperhatikan kondisi dan potensi perikanan didaerah ini, maka program kerja pembangunan perikanan Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan serta pengembangan usaha budidaya pertambakan dalam rangka peningkatan pendapatan.
2. Peningkatan institusi pemasaran dan pemerataan distribusi perikanan untuk mempermudah suplai ikan bagi masyarakat yang bermukim di pedalaman.
3. Peningkatan ekspor sekaligus menekan impor komoditas perikanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Pemanfataan seefesien mungkin serta pemeliharaan kelestarian sumber daya dan lingkungan perairan.
5. Meningkatkan peranan sub sektor perikanan dalam kegiatan dan pembangunan pedesaan terutama dalam hal menciptakan peluang bekerja dan berusaha.

Evaluasi pelaksanaan tugas sub sektor perikanan Indragiri Hilir disusun berdasarkan realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Indragiri Hilir serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh nelayan/petani ikan di daerah ini sehingga akan tergambarpencapaian sasaran target berdasarkan yang telah diprogramkan.

Luas lahan potensial untuk usaha pengembangan budidaya air payau (tambak) sekitar 13.000 hektare, sedangkan untuk budidaya air tawar (kolam) sekitar 1.657 Ha. Jumlah penduduk yang berusaha di bidang perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung/sambilan.

Pertambangan

1. Batubara
2. Granit
3. Pasir
4. Pasir Sungai (Pasir Timbun)
5. Pasir Kuarsa
6. Tanah Liat
7. Kaolin
8. Gambut
9. Tanah Urug

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

PROGRAM PEMBANGUNAN STRATEGIS

Program Pembangunan Strategis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, berikut Program Pembangunan Strategis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir :

1. Pembangunan Bandara Tempuling
2. Percepatan fungsionalisasi Pelabuhan Samudera Kuala Enok
3. Pembangunan Jembatan Kuala Getek
4. Pembangunan Jembatan Sei Gergaji
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang diawali melalui pemantapan pendidikan dasar
6. Peningkatan kualitas out put Politeknik Pertanian Tembilahan
7. Pembangunan Rumah Sakit Sei Guntung dan Reteh
8. Rehabilitasi perkebunan kelapa rakyat
9. Pengembangan pertanian polikultur
10. Peningkatan dan pengembangan sentra produksi pertanian (padi)
11. Pembangunan Pelabuhan Nasional Pulau Burung
12. Pembangunan jembatan Teluk Pinang
13. Review Tata Ruang Kabupaten
14. Pembangunan Pasar Rakyat Sungai Guntung
15. Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa melalui peningkatan Trio Tata Air
16. Pembangunan dan peningkatan jalan dalam rangka membuka isolasi daerah pedesaan (sharing dengan Propinsi)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tahun 1962 kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukota Rengat, masih menjadi kabupaten Indragiri yang akhirnya dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Pada tahun yang sama dibentuk Resrot Pertanian Indragiri Hilir utara dan Indragiri Hilir Selatan yang berkedudukan di Tembilahan dengan cikal bakal Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang ada sekarang ini, dan ini berjalan sampai akhir tahun 1965.

Di awal tahun 1966 berubah menjadi kantor Pertanian dengan kepala kantor Bapak Abdul Muis dan ini berjalan sampai dengan tahun 1970. Perkembangan ini juga sejalan dengan berubahnya status kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu pada tahun yang sama (1965).

Pada tahun 1971 kantor pertanian berubah menjadi status menjadi kantor Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Indragir Hilir dengan Personilnya hanya 4 orang dan ini berlangsung sampai dengan tahun 1978 dalam masa itu juga diadakan penambahan pegawai baru.

Seterusnya sejak tahun 1978 berubah lagi menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan ini berlangsung sampai tahun 2000 dan dalam waktu itu sempat beberapa kali pergantian kepala Dinas yaitu Bapak Jadin Kesuma, Ir Imhar Effandi ,Bapak Ir. Ahyar, Bapak Ir. Daswar, dan Bapak Ir. Arif Abidin Pohan. Kemudian dengan dilaksanakannya otonomi daerah di awal tahun 2001 Dinas Pertanian Tanaman Pangan berubah lagi menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Indragiri Hilir dengan kepala Dinas Bapak Ir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H. Humizry, MM yang bertugas selaku kepala sampai dengan bulan Mei 2004 sejak juni 2004 sampai dengan Desember 2004 kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura kabupaten Indragiri Hilir diganti dengan Bapak Ir. Yulfiar disampai dengan akhir Desember 2004. Sejak 28 Desember 2004 Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Peternakan berubah menjadi Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir dengan kepala Dinas Ir. Kuswari, Mp kemudian pada tanggal 2 Februari 2009 menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dengan kepala Dinas H. Urip Sukarno sampai dengan 26 Agustus 2011. Dan setelah itu diganti dengan Bapak Wiryadi, S.Sos. M.si sampai dengan tahun 2015. Kemudian di gantikan oleh Drh. Urip Sukarno sampai dengan Maret 2015 selanjutnya di duduki oleh Pejabat Pelaksana Tugas oleh Bapak H. Fajar Husin, SH sampai dengan Desember 2015. Pada Januari Tahun 2016 di Gantik Oleh Pejabat Definitif yaitu Ir. H. Kuswari, MP sampai dengan sekarang.

C. Gambaran Umum Kelurahan Kempas Jaya

Kelurahan Kempas Jaya dahulunya adalah pemerkaran dari Desa Teluk Kiambang dan Pekan Tua yang pada awalnya bernama Desa Kempas Jaya, sejarah Kelurahan Kempas Jaya adalah sebagai sasaran lokasi trannsmigrasi umum pada masa orde baru. Ekstran pertama yakni pada tahun 1972, saat ini menempati wilayah RW 04, 05, 06, dan 07. Ekstran kedua yakni pada tahun 1975, saat ini menempati wilayah RW 07, 08, 09, 10, 11 dan 12.

Pada tahun 1976 Kelurahan Kempas Jaya diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-9 sekaligus penyerahan Desa Transmigrasi pada kepemerintahan daerah. Pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1980 Kelurahan Kempas Jaya bertransisi dari Desa ekstran menjadi Desa persiapan. Sesuai Perda

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No.12 tahun 1981 Desa Kempas Jaya dirubah menjadi Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Tempuling, kemudian sesuai dengan perda No. 16 tahun 2005 Kelurahan Kempas Jaya dirubah kecamatannya menjadi Kecamatan Kempas hingga sekarang. Kelurahan Kempas Jaya terdiri dari 49 RT dan 13 RW dan dibagi menjadi dua lingkungan yakni lingkungan ekstran dan lingkungan masyarakat penduduk asli dengan dua Kepala Dusun. Masyarakat penduduk asli merupakan RW 01, 02, 03, 08, dan 13 sedangkan masyarakat transmigrasi RW 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 04. Penduduk keseluruhan Kelurahan Kempas Jaya sekitar 7.031 jiwa yakni meliputi Laki-laki 3.593 jiwa sedangkan Perempuan 3.438 jiwa.

D. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pentingnya pengorganisasian suatu unit kerja diperlukan untuk kelancaran pelaksanaaan rencana kerja dan program kerja oleh karena itu pengorganisasian kerja merupakan pengaturan dan pembagian kerja akan memudahkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing orang pada organisasi, perlu di buat suatu susunan yang jelas tentang pembagian kerja dan kedudukan.

Karena perlunya pengaturan dan pembagian kerja yang jelas merupakan konsekuen dan ketebatasan seseorang dalam memimpin suatu organisasi sementara pengaturan dan pembagian kerja umumnya tercermin pada struktur organisasi tersebut.

Adapun struktur organisasi yang terdapat di dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hilir.

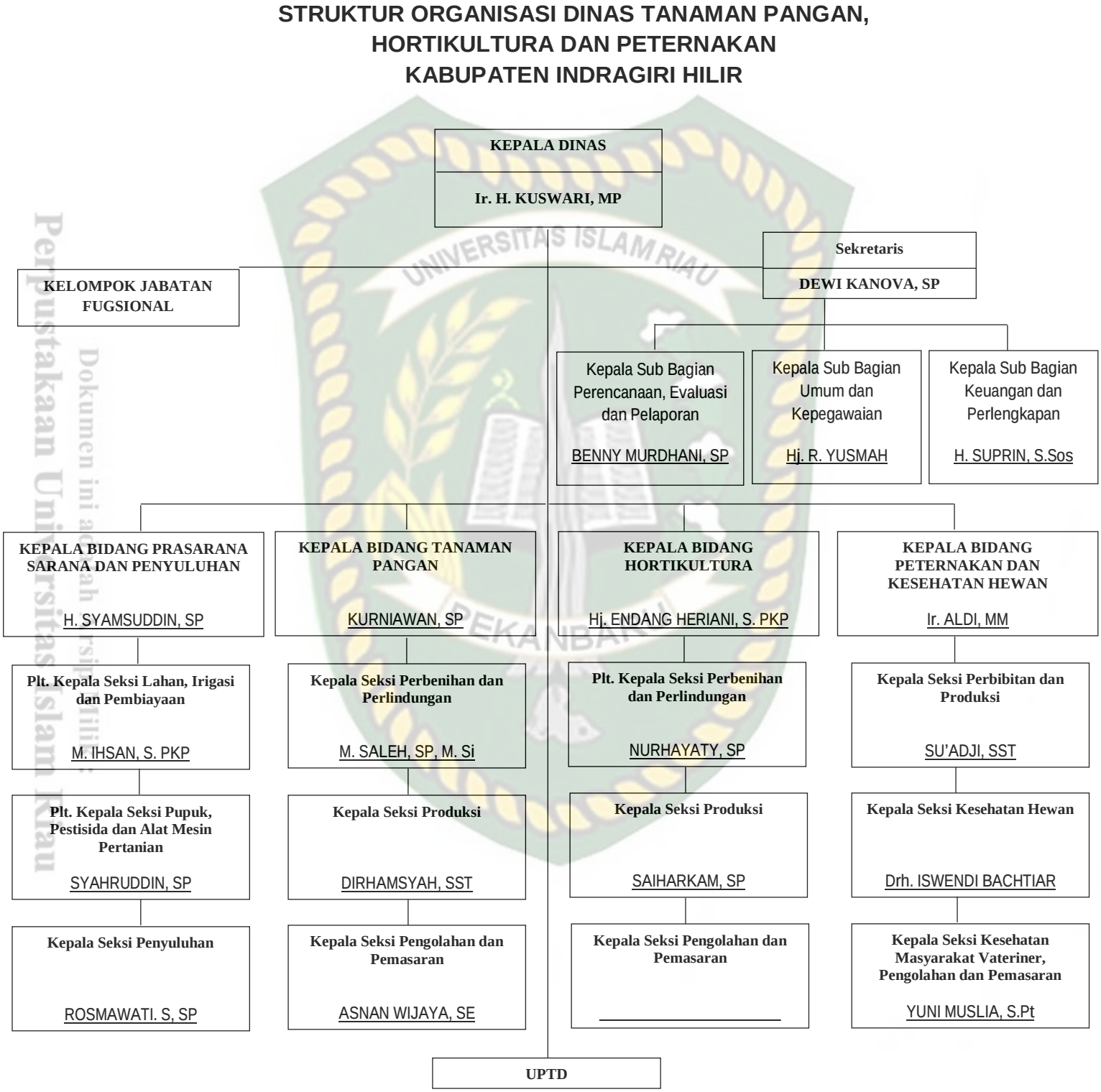

Sumber *: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir 2019*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Fungsi dan Tugas Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Tugas Pokok dan fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pertanian lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan lingkup bidang Kesekretariatan, Prasarana Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan lingkup bidang bidang Kesekretariatan, Prasarana Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

c. Penyelenggaraan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan lingkup bidang bidang Kesekretariatan, Prasarana Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

d. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan lingkup bidang bidang Kesekretariatan, Prasarana Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

e. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan di bidangPrasarana Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatatusahaan, kepegewaian, keuangan, kerumah tanggaan, keperotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan;

c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. Penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kesekretariatan;

e. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

f. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur;

g. Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;

i. Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja Dinas yang meliputi Laporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas;

j. Mengevaluasi tidak lanjut rapat-rapat intern;

k. Koordinasi penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

d. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

j. Mengumpul dan mengelola data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran SKPD;

k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD;

l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran (RKA/RKA KL), penyusunan dan pembahasan revisi DPA/DIPA SKPD;

m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Fisik dan Keuangan SKPD;

n. Mempersiapkan bahan-bahan dan mengikuti musrenbang RKPD Kecamatan;

o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;

p. Melaksanakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan

q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;

d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;

e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;

f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;

g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Penyuluhan

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Penyuluhan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada, sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Penyuluhan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;

c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;

d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Penyuluhan;

e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;

f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;

g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;

i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Penyuluhan;

j. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan Seksi Penyuluhan;

k. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan Seksi Penyuluhan;

l. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan Seksi Penyuluhan;

m. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Penyuluhan;

n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Penyuluhan lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, informasi, penyusunan program penyuluhan pertanian, bahan materi, pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian, bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi, penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian, penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, fasilitas akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh pertanian, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;

o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

6. Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Tanaman Pangan

Kepala Bidang Tanaman Panganmempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Tanaman Pangan lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Tanaman Pangan lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Tanaman Pangan lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Tanaman Pangan lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Tanaman Pangan lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Tugas pokok Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pengolahan dan Pemasaran.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan serta memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang;
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produkpadi dan palawija;

d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produkpadi dan palawija;

f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produkpadi dan palawija;

g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produkpadi dan palawija;

h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produkpadi dan palawija;

i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

j. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

k. Menyiapkan metode, media dan upaya teknis penyelenggaraan Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

l. Kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak ketiga dalam hal urusan Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

m. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

n. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pengolahan dan Pemasaran lingkup panen dan pasca panen, produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan, informasi pasar, fasilitasi promosi produkpadi dan palawija;

o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, terkadang muncul pertanyaan dalam benak pembacanya. Pertanyaan nya tentang identitas informan penelitian tentunya sangatlah wajar. Maka pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan Identitas Responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Pemberdayaan Petani Melalui program peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan Peternakan Di kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ini penulis akan menjelaskan mengenai Identitas Informan yang diteliti. Hal – hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini mengenai Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengarushnya jenis kelamin infroman terhadap hasil penelitan dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian.

Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangat didpminasi oleh kaum laki – laki. Hal ini diakibatkan oleh pemahaman masyarakat dilokasi penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terkait dengan masalahyang terjadi memang lebih dimiliki oleh kaum laki – laki. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang menajdi informan dalam penelitian ini sangatlah mencolok yaitu 9 orang Informan laki-laki sedangkan Informan perempuan hanya 1 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan Usia Informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia. Walaupun kedewasaaan pola fikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusia pola fikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia Informannya, mulai dari yang termuda yaitu 32 tahun sampai pada yang paling tua 56 tahun. Adapun usia informan penelitian adalah sebagai berikut :

Daftar Tabel V.1 Usia Informan

No	Nama	Kedudukan	Umur	Keterangan
1	Ir. Kuswari MP	Kepala Dinas	51 Tahun	Pemerintah Daerah
2	Dewi Kanova	Sekretaris	41Tahun	Pemerintah Daerah
3	Benny Murdhani SP	Kasubag Perencanaan dan Pengendalian	32 Tahun	Pemerintah Daerah
4	Dirhamsyah. S. ST	Kasi Tanaman Pangan dan Holtikultura	45 Tahun	Pemerintah Daerah
5	Syamsudin SP	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluh	47 Tahun	Pemerintah Daerah
6	Pak Ali SP	Koordinator Kecamatan Kempas	49 Tahun	Pemerintah Daerah
7	Suristo, SP	Penyuluh Pertanian Di	44 Tahun	Pemerintah Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		Kelurahan Kempas Jaya		
8	Asep Hermawan	Ketua Gapoktan Di Kelurahan Kempas Jaya	56 Tahun	Petani
9	Swi Suprayetno	Kelompok Tani Makmur Di Kelurahan Kempas Jaya	34 Tahun	Petani
10	Suhari	Kelompok Tani Setia Karya Di Kelurahan Kempas Jaya	40 tahun	Petani

Sumber olahan peneliti 2019

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang tidaklah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Pemahaman seorang Informan terhdap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik daripada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dri mereka yang tamat sekolah menengah Atas (SMA) sampai yang tertingi Sarjana atau Mahasiswa serta Magister (S2). Adapun Jumlahnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 orang, Sarjana atau Mahasiswa 6 Orang serta Magister (S2) 1 orang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daftar Tabel V.2 Pendidikan Informan

No	Nama	Kedudukan	Umur	Keterangan
1	Ir. Kuswari MP	Kepala Dinas	51 Tahun	Pemerintah Daerah
2	Dewi Kanova	Sekretaris	41Tahun	Pemerintah Daerah
3	Benny Murdhani SP	Kasubag Perencanaan dan Pengendalian	32 Tahun	Pemerintah Daerah
4	Dirhamsyah. S. ST	Kasi Tanaman Pangan dan Holtikultura	45 Tahun	Pemerintah Daerah
5	Syamsudin SP	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluh	47 Tahun	Pemerintah Daerah
6	Pak Ali SP	Koordinator Kecamatan Kempas	49 Tahun	Pemerintah Daerah
7	Suristo, SP	Penyuluh Pertanian Di Kelurahan Kempas Jaya	44 Tahun	Pemerintah Daerah
8	Asep Hermawan	Ketua Gapoktan Di Kelurahan Kempas Jaya	56 Tahun	Petani
9	Swi Suprayetno	Kelompok Tani Makmur Di Kelurahan Kempas Jaya	34 Tahun	Petani
10	Suhari	Kelompok Tani Setia Karya Di Kelurahan Kempas Jaya	40 tahun	Petani

Sumber olahan penlis 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam pembahasan BAB ini, akan diuraikan hasil penelitian tentang Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan petani oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan peternakan Kabupaten Indragiri Hilir di Kelurahan Kempas Jaya. Peneliti mendapatkan data dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kasubag Perencanaan evaluasi dan pelaporan, Kabid Prasarana sarana dan penyuluhan (PSP), Kasi Tanaman Pangan, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kempas, Penyuluh Pertanian Kempas Jaya, Gapoktan Kempas Jaya, serta Ketua Kelompok Tani Keluran Kempas jaya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan petani tentu perlu kebijakan yang tepat sasaran agar tujuan pemberdayaan petani tepat pada tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Agar tujuan pemberdayaan petani tepat pada sasaran tentu perlu koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta Pemerintah Daerah kabupaten Indragiri Hilir.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, data yang didaptkan berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan kriteria peneliti yang dianggap bisa mewakili dari penelitian yang diangkat. Narasumber yang dipilih adalah orang yang mengetahui dan terlibat tentang Pemberdayaan Petani

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil observasi dan wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini, kemudian data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang terdapat pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung seacara lisan antara peneliti dan narasumber mengenai hal-hal yang perlu diketahui dalam penelitian. Wawancara memfokuskan dan menanyakan upaya Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yang telah dibuat peneliti tentang Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, berdarkan indikator variabel penelitian yang ada diantaranya adalah :

1. Penyadaran

Pada tahap penyadaran target yang hendak diberdayakan terlebih dahulu diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak unutk mempunyai “sesuatu”. Misalnya target adalah kelompok masyarakat miskin, maka kepada mereka diberiukan pemahaman bahwa mereka dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjadi “berada”, dan itu dapat dilakukan jika mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini target “diisi” dengan pengetahuan, perinsip dasar dari tahap ini adalah target dibuat menjadi mengerti bahwa mereka perlu membangun “demand” untuk diberdayakan, dan peroses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Nugroho dan Wrihatnolo (2007 :2)

2. Penguatan *(empowering)*

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berati kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses unutk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum memiliki daya. Sulistiyani (2004 : 43)

3. Perlindungan *(protecting)*

Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pembberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, olehnkarena kekurangberdayaannya dalam mengahdapi yang kuat. Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Kartasasmita (1995 :84)

1. PENYADARAN

Penyadaran merupakan penyadaran dengan target, yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka punya hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsipnya, membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007:2)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kegiatan penyadaran dalam proses pemberdayaan secara tidak langsung mendorong partisipasi masyarakat dlam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sependapat dengan Rahman (2016:196) mengatakan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk menyadarkan, mengembangkan dan mendorong peran serta aktif masyarakat. Maka semua pihak yang terlibat dalam program peningkatan kesejahteraan petani perlu memahami bahwa keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Perlu membentuk kesadaran menuju prilaku sadar dan peduli dengan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahap ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan yaitu petani harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat membuat petani menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.

Dengan hal ini perlunya adanya program yang mendukung dan keterkaitan dengan pemberdayaan melalui penyadaran yaitu melalui program peningkatan kesejahteraan petani, hal ini bisa di lakukan dengan berbagai kegitan yang ada di program tersebut.

Dengan dilakukannya kegitan-kegiatan melalui program peningkatan kesejahteraan petani diharapkan pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dapat mampu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan petani Kelurahan kemapas jaya.

Dalam penelitian ini penyadaran yang diberikan kepada petani merupakan memberikan pencerahan dalam bentuk peyadaran bahwa masyarakat memiliki hak untuk memiliki sesuatu serta memberitahu bahwa proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluh, Kasi Produksi tanaman Pangan dan Koordinator Penyuluh Kecamatan Kempas, Penyuluh Pertanian Kelurahan Kempas Jaya, Gapoktan Kempas jaya serta Kelompok Tani Makmur dan Setia karya Kelurahan Kempas Jaya yang didasarkan pada indikator penyadaran didapati bahawa responden memberikan komentar atau pernyataan diantaranya yang disampaikan Bapak Ir. H. Kuswari., MP bahwa :

> *“ Penyadaran pernah dilakukan kepada kelompok tani dalam bentuk Deplot, Sekolah Lapangan (SL) serta mengirim petani untuk studi banding kedaerah lain agar meningkatkan pengetahuan petani. (Ir. H. Kuswari., MP, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 21 Mei 2019_16 : 30 WIB)”*

Penyadaran yang diberikan kepada petani sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri, menggali potensi diri serta meningkatkan pengetahuan petani. Ini juga di dukung dengan ungkapan Benny Murdhani, SP yang mengatakan :

> *“ Penyadaran yang diberikan kepada petani dalam bentuk Pembinaan Kelembagaan Kelompok tani, Pelatihan-pelatihan atau Sosialisasi serta pemberian bantuan sarana prasarana pertanian. (Benny Murdhani, SP.,*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kasubag Perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 22 April 2019_16 : 00 WIB)"

Syamsudin, SP Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluh (PSP) sependapat dengan ungkapan diatas dalam wawancara kepada peneliti menyampaikan :

" Melakukan pertemuan melalui penyuluh pertanian kepada kelompok tani setiap bulan rutin (Penyuluhan) sifat dari pertemuan itu tergantung kegiatan yang dilakukan. (Syamsudin, SP Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluh (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 21 Mei 2019_ 14.30 WIB)"

Senada dengan ungkapan di atas untuk meciptakan suasana yang dapat meningkatkan potensi kelompok tani agar berkembang secara optimal sangat di perlukan dalam dalam penyadaran kepada petani. Berdasarkan yang di sampaikan oleh ibuk Dwi Kasanova, SP yang mengatakan :

" Dalam meningkatkan potensi dari para petani, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan berbagai kegiatan pertanian serta bantuan dalam bentuk fisik, sarana prasarana pertanian serta meberikan pelatihan kepada petani. (Dwi Kasanova, SP., Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 22 April 2019_10 : 00 WIB)"

Pernyatan diatas diperkuat oleh Bapak Dirhamsyah S. ST selaku Kasi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, yang mengatakan :

" Untuk menciptakan suasana yang dapat meningkatkan potensi kelompok tani agar dapat berkembang secara optimal dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan petani serta memberikan bantuan yang dibutuhkan petani. (Dirhamsyah, S.ST., Kasi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 21 Mei 2019_10 : 30 WIB)"

Dalam proses penyadaran yang dilakukan terdapat faktor yang menghambat untuk meningkatkan kreatifitas dari kelompok tani. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Ali Ambra, SP dalam wawancara, yang mengatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

“ Kurangnya kesadaran petani dalam partisipasi dalam kegiatan usaha tani, kondisi lapangan yang tergantung kondisi alam, masih rendahnya pengetahuan petani terhadap penerapan teknologi pertanian serta anggaran yang terbatas untuk melakukan kegiatan. (Ali Ambra, SP., Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kempas, 04 Mei 2019_15.30 WIB)”

Sehubungan dengan ungkapan diatas bahwa penyadaran yang telah diberikan kepada petani tentunya memberikan dampak terhadap pemberdayaan petani yang sangat mempengaruhi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suristo, SP yang mengatakan :

“ Semangat berusaha tani dari satu kali tanam sampai dua kali tanam bahkan menuju tiga kali tanam dalam setahun, meningkatnya kerja sama antara masyarakat tani karena keinginan yang sama. (Suristo, S., Penyuluh Perrtanian Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_ 17 : 00 WIB)”

Bertolak belakang dengan ungkapan sebelumnya, bahwa penyadaran yang diberikan kepada petani belum sepenuh nya dirasakan oleh kelompok tani makmur kelurahan Kempas Jaya. Hal ini menunjukan belum maksimal nya penyadaran yang diberikan kepada petani untuk meningkatkan kemampuan dari potensi yang ada pada petani. Ini di dukung dengan hasil wawancara dengan bapak Swi Suprayetno :

“ Penyadaran ada diberikan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan sosialisasi ketika ada pelatihan tetapi kami tidak pernah mengikuti karena yang dikumpulkan hanya ketua kelompok saja dan saat ini untuk penggunaan mesin bajak sawah kami mengupahkan kepada orang lain yang mempunyai mesin bajak untuk membajakan sawah kami karena kami tidak paham mengunakannya. Untuk memanen padi masih secara manual, ada bantuan mesin panen dan pengering padi tapi tidak bisa menggunakannya. (Swi Suprayetno, Sekretaris Kelompok Tani Makmur Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_11 : 00 WIB)”

Senada dengan pernyataan di atas penyadaran yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

petani haruslah tepat sasaran kepada petani, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Suhari, dalam wawancara :

> *“ Kalau penyadaran pernah diberikan dan sosialisasi juga pernah ada dari dinas provinsi dan kabupaten dalam bentuk penyuluhan, namun itu hanya ketika dibutuhkan saja ketika di sampaikan untuk ngumpul ya ngumpul saja namun sejuh ini belum ada penyelesaian dari permasalahan yang ada seperti air pasang yang merendam sawah kami, dan ketika ada serangan hama wereng juga tidak ada penyelesaian dari dinas kami hanya lakukan secara manual. Serta sejauh ini kami bertani hanya manual saja seperti biasanya dengan menggunakan peralatan pertanian yang kami punya. (Suhari, Ketua Kelompok Tani Setia Karya Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_16 : 00 WIB)”*

Sehubungan dengan ungkapan diatas bapak asep hermawan selaku ketua Gapoktan Maju Bersama Kempas Jaya, dalam wawancara kepada peneliti mengatakan :

> *“ Penyuluhan dilakukan sebulan sekali di BPP untuk ketua kelompok tani saja, sejauh ini unuk meningkatkan potensi dari petani dilakukan seara alami saja dan mengolah tanah secara manual dan selama ini belum pernah ada pembinaan mengenai pemberdayaan petani oleh Dinas kami bertani seecara alami dan untuk bibit kadang bisa titip dengan temen yang kalau pulang ke jawa atau ke derah lain kalau bibit nya bagus bisa kita pesan dahulu. (Asep Hermawan, Gapoktan Maju Bersama Kempas Jaya, 2 Mei 2019_16 : 00 WIB)”*

Berdasarkan hasil observasi peneliti penyadaran yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir masih minim seperti sosialisasi, pemahaman petani mengenai alat mesin pertanian, maka hasil penelitian memperlihatkan Pimpinan atau penanggung jawab pelaksanaan program di daerah, dinilai masih lemah dalam melakukan penyadaran kepada petani di kelurahan kempas jaya.

Pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani tidak mengambil manfaat secara optimal dari seluruh “*Penyadaran*” yang dilakukan. Tidak ada inovasi yang nyata dalam melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegitan sehari-harinya. Inovasi adalah Suatu gagasan ataupun barang/hal yang baru belum ada ataupun yang sudah ada tetapi belum diketahui oleh pengadopsi. Inovasi juga dapat berupa metode baru untuk meningkatkan mutu/kualitas terhadap suatu program atau barang yang sudah ada (Udin Syaifudin Sa'ud, 2014 : 4). Cara-cara dalam bertani masih dilakukan sebagian petani secara mandiri, pergi "bertani" dengan peralatan yang sudah baik namun kurang nya pemahaman akan alat-alat mesin pertanian, perolehan hasil produksi padi bersandar pada musim dan "nasib baik", hasil gabah atau padi sebagian di bagi hasil dengan pemilik lahan biasanya di bagi tiga, dua untuk petani satu untuk pemilik lahan tergantung kesepakatan, serta hasil yang di dapat petani biasanya di jual kepada seorang tengkulak atau pengepul padi di Kelurahan Kempas Jaya. Tidak ada upaya lain yang dilakukan seperti misalnya pemahaman akan bibit unggulan, pemahaman alat mesin pertanian (modren), serta pemahaman cara mengatasi hama yang menyerang padi. Sebagian besar para petani ini adalah bersuku Jawa, mereka bertani secara turun temurun kepada generasi selanjutnya. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa para petani yang tergabung dalam berbagai Kelompok Tani, tidak merespon berbagai upaya peningkatan pengetahuan yang diberikan kepada mereka, seperti kegiatan-kegiatan yang inovatif di sektor pertanian.

2. PENGUATAN *(EMPOWERING)*

Penguatan *(Empowering)* yakni memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. (Kartasasmita 1995:84)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penguatan sangatlah diperlukan dalam proses pemberdayaan petani, penguatan bisa dilakukan dengan inovasi yang dibutuhkan petani, seperti memperkuat pengetahuan dan kemampuan petani, bantuan-bantuan alat mesin pertanian, bantuan bibit-bibit unggul pertanian, bantuan alat/obat pembasmi hama dan lainnya yang akan menunjang potensi dan kemandirian petani.

Penguatan yang diberikan kepada petani dalam penelitian ini untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah serta agara memenuhi kebutuhan – kebutuhan secara mendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluh, Kasi Produksi tanaman Pangan dan Koordinator Penyuluh Kecamatan Kempas, Penyuluh Pertanian Kelurahan Kempas Jaya, Gapoktan Kempas jaya serta Kelompok Tani Makmur dan Setia karya Kelurahan Kempas Jaya yang didasarkan pada indikator penguatan didapati bahawa responden memberikan komentar atau pernyataan diantaranya yang disampaikan Bapak Ir. H. Kuswari., MP, bahwa :

> *“ Untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki petani Dengan melakukan Pelatihan, Studi Banding, serta pelatihan untuk Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), untuk kebutuhan petani menjadi mandiri diberikan bantuan Melalui Alat Mesin Pertanian (Alsintan) prapanen, pasca panen, dan bantuan benih, bibit, pestisida, dan lain-lain (Ir. H. Kuswari., MP, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 21 Mei 2019_16 : 30 WIB)”*

Senada dengan ungkapan di atas untuk Memperkuat pengetahuan dan kemampuan dari kelompok tani, Bapak Benny Murdhani, SP., Kasubag

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir dalam wawancara mengatakan :

> *" Untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalahnya dilakukan Penuyuluhan & bimbingan kepada petani, pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida dan sampai Alsintan (alat mesin pertanian) Melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan lembaga kelompok tani, memberikan sarana produksi pertanian. Faktor penghambat dari penguatan kelompok tani ini ialah Masih kurangnya tenaga penyuluh yang ditempatkan keseluruh kecamatan dan desa. (Benny Murdhani, SP., Kasubag Perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 22 April 2019_16 : 00 WIB)"*

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan dari kelompok tani sangat diperlukan meningkatkan penguatan kepada petani agar meningkatknya hasil produksi dan produktivitas petani. Hal ini senada dalam wawancara yang disampaikan oleh bapak Dirhamsyah S.ST, yang mengatakan :

> *" Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalahnya Dengan Memberikan penyuluhan dan Pertemuan kepada Petani Memberikan bantuan pupuk, benih lengkap, herbisida, serta masin pertanian (ada untuk kelompok dan ada dipinjamkan) serta faktor penghambat yang terjadi dalam penguatan kepada petani merupakan Anggaran yang terlalu rendah untuk pengadaan & kegiatan yang akan di salurkan ke petani, serta tidak semua petani yang menerima bantuan pupuk dan lain-lain sesuai yang telah mengikuti anjuran dan yang membutuhkan oleh penyuluh pertanian. (Dirhamsyah, S.ST., Kasi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 21 Mei 2019_10 : 30 WIB)"*

Pernyatan diatas diperkuat oleh Ibuk Dewi Kasanova, SP selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, yang mengatakan :

> *" Memperkuat pengetahuan dan kemmpuan petani dilakukan studi banding/pelatihan serta sosialisasi, untuk memenuhu kebutuhan petani diberikan bantuan dalam bentuk fisik seperi mesin pertanian, pupuk atau bibit serta untuk komunikasi antar pemerintan dan petani bisa melalui PPL dilapangan. (Dewi Kasanova, SP., Sekretaris Dinas Tanaman Pangan,*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 22 April 2019_10 : 00 WIB)"

Penguatan sangatlah penting diberikan kepada petani tak terlepas dari faktor – faktor penghambat yang terjadi di dalam penguatan kepada petani. Seperti yang ungkapan kan dalam wawancara peneliti kepada Bapak Syamsudin SP, Bapak Ali Ambra SP, beliau menyampaikan :

" Anggaran terlalu rendah untuk pengadaan dan kegiatan yang akan di salurkan ke petani sert tidak semua petani menerima bantuan pupuk, bibit, dll sesuai yang ikut anjuran dan yang membutuhkankan saja (Ali Ambra, SP., Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kempas, 04 Mei 2019_15.30 WIB)"

Sependapat dengan hal diatas Bapak Syamsudin SP Syamsudin, SP Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluh (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan dalam wawancara kepada peneliti, yaitu :

" Petani tidak menerima masukan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dan susah untuk dikumpulkan serta tergantung latar belakang pendidikan dari petani. (Syamsudin, SP Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluh (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 21 Mei 2019_ 14.30 WIB)"

Sependapat pernyataan ditas diperkuat oleh Bapak Suristo, SP., selaku Penyuluh Perrtanian Kelurahan Kempas Jaya, yang menyampaikan :

" Masih rendahnya pengetahuan petani terhadap penerapan teknologi pertanian, dalam waktu bersamaan dengan dia (petani) mengelola kebun/bentrok dengan pekerjaan lain serta kendala kondisi alam banjir akibat air pasang yang merendam lahan pertanian petani. (Suristo, SP., Penyuluh Perrtanian Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_ 17 : 00 WIB)."

Sehubungan dengan pendapat diatas bahwa penguatan yangan dilakukan oleh Dinas masih kurang tepat sasaran yang dirasakan oleh petani, seperti yang di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sampaikan dalam wawancara penulis kepada bapak Asep Hermawan, yang mengatakan :

> *" Inisiatif sendiri dari petani seperti masalah kekurangan air dan lain – lain. Ada bantuan Alat Mesin Pertanian (alsintan), seperti open/pengering petani tidak bisa menggunakan alat tersebut dan tidak tepat sasarannya bantuan alat mesin pertanian seperti open/ pengering itu diletakan ditempat tengkulak/pengepul padi kami tidak dapat menggunakannya serta komunikasi selama ini dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir masih kurang karena tidak pernah langsung terjun ke petani. (Asep Hermawan, Gapoktan Maju Bersama Kempas Jaya, 2 Mei 2019_16 : 00 WIB)"*

Senada dengan ungkapan diatas juga disampaikan oleh petani masih kurang tepat sasarannya bantuan dan penguatan yang diberikan oleh dinas, seperti yang di sampaikan oleh bapak Swi Suprayetno, sebagai berikut :

> *" Pernah ada studi banding cuma itu yang ditunjuk oleh penyuluh nya saja dek, kalo kami tidak pernah merasaka dan juga yang berangkat itu tidak pernah meceritakan apa yang di dapat ketika studi banding. Kalaupun ada penyuluhan dari dinas kami disuruh kumpul saja. Bantuan ada seperti bibit, pupuk dan alat mesin. Tapi tidak sesuai dengan kondisi disini, seperti bibit juga tidak sesuai dengan yang kami gunakan sebelumnya, kalo pupuk juga jarang kami dapat dan mesin juga tidak bisa kami gunakan seperti mesin bajak sawah dan perontok padi tidak sesuai dengan tanah disini, pernah di coba tapi tenggelam/amblas mesin nya ada juga mesin pengering padi tidak dapat digunakan karena kapasitasnya banyak minimal 10 Ton, sedangkan padi kami tidak pernah mencapai segitu dek (Swi Suprayetno, Sekretaris Kelompok Tani Makmur Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_11 : 00 WIB)"*

Pernyatan diatas diperkuat oleh Bapak Bapak Suhari selaku Ketua Kelompok Tani Setia Karya Kelurahan Kempas Jaya, dalam wawancara kepada peneliti yang menyampaikan :

> *" Untuk bantuan seperti bibit dan pupuk ada pernah diberikan serta bantuan mesin pertanian juga ada namun tidak bisa kami gunakan ketika datang dan dipakai mesin nya terbenam di tanah/kandas karena kondisi tanah disini lembut. Serta juga belum ada solusi mengenai air pasang yang membanjiri sawah kami, karena kalau air pasang itu naik kesawah bisa membuat gagal panen dan padi kami menjadi mati semua (Suhari, Ketua Kelompok Tani Setia Karya Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_16 : 00 WIB)"*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan masih banyak nya bantuan yang diberikan oleh dinas belum di dapat oleh petani seperti bibit, pupuk, serta bantuan mesin pertanian secara menyeluruh, maka Penguatan *(Empowering)* di Kelurahan Kempas Jaya masih dibilang lemah, dari hasil wawancara petani mengeluhkan belum merata dan belum tepat sasaran bantuan kepada petani yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penguatan kepada petani di kelurahan kempas jaya sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hasil produksi petani serta juga dalam meningkatkan kesejahteraan petani, maka dari itu diperlukan peningkatan penguatan kepada petani di kelurahan kempas jaya oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapati peneliti dilapangan berkaitan dengan penguatan yang diberikan oleh dinas seperti Bibit, Pupuk, bantuan Alat mesin pertanian masih terbatas dan belum efektif diberikan kepada petani. Mengenai adanya air pasang yang naik ke lahan pertanian petani yang menyebabkan padi menjadi mati semua bahkan sampai gagal panen belum di tanggapi dengan serius oleh Dinas, menurut hemat peneliti Dinas haruslah membuat tanggul di sekitar bibir sungai yang berada pada area lahan pertanian masyarakat agar air pasang yang terjadi tidak merendam lahan pertanian masyarakat. Berkaitan dengan bantuan alat mesin pertanian, seperti mesin perontok padi dan mesin open pengering padi yang diberikan oleh Dinas haruslah tepat pada sasaran karena selama ini belum efektif. Menurut hemat peneliti ketika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melihat dilapangan seperti alat mesin perontok padi sebagian petani tidak bisa menggunakan alat tersebut karena ketika di letakan pada lahan pertanian masyarakat mesin tersebut amblas ke dalam tanah dikarenakan kondisi tanah yang lembut, maka dari itu Dinas dalam memberikan bantuan haruslah melakukan dan sosialisasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh petani agar bisa dipergunkan dengan baik serta bisa menunjang produksi hasil pertanian masyarakat. Begitu juga dengan open pengering yang diberikan oleh dinas tidak dapat dipergunakan oleh petani dikarenakan kapasitas yang dimiliki untuk satu kali penggunaan alat mesin pengering padi tersebut adalah 10 Ton, sedangkan padi atau gabah yang dimiliki oleh petani tidak mencapai sebanyak itu. Maka dari itu Dinas haruslah melihat secara langsung kelapangan serta bermusyawarah seperti apa yang dibutuhkan petani dalam memberikan bantuan alat mesin pertanian. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan Penguatan yang dilakukan oleh Dinas masih terbilang lemah, maka dari itu Dinas selaku Pemerintah Daerah haruslah lebih memperhatikan kembali bantuan – bantuan yang diberikan kepada masyarakat serta melakukan pengawasan untuk meningkatkan hasil produksi padi milik petani dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Kempas Jaya.

3. PERLINDUNGAN *(PROTECTING)*

Perlindungan (*protecting*), harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan yang lemah, oleh karena kekurangberdayaan mengahdapi yang kuat. (Kartasasmita 1995:84)

Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah, melindungi tidak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi karena hal itu bukan akan memperkuat tetapi justru melemahkan. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta ekspoitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Perlindungan kepada petani merupakan kewajiban oleh dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir untuk memenuhi kebutuhan petani. Perlindungan yang di perlukan tentu harus disesuai dengan yang dibutuhkan petani.

Dalam penelitian ini perlindungan yang dberikan untuk melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi.

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluh, Kasi Produksi tanaman Pangan dan Koordinator Penyuluh Kecamatan Kempas, Penyuluh Pertanian Kelurahan Kempas Jaya, Gapoktan Kempas jaya serta Kelompok Tani Makmur dan Setia karya Kelurahan Kempas Jaya yang didasarkan pada indikator perlindungan didapati bahawa responden memberikan komentar atau pernyataan diantaranya yang disampaikan Bapak Ir. H. Kuswari., MP bahwa :

> *“ Perlindungan telah diberikan kepada petani melalui asuransi usaha tanaman padi kualitas hasil pertanian juga sudah bagus karena banyaknya bantuan seperti Drayer/pengering, dll serta melalui upaya dengan pemupukan dan pengairan yamg cukup, bantuan mesin, benih unggulan, serta pengendalian hama yang baik (Ir. H. Kuswari., MP, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 21 Mei 2019_16 : 30 WIB)”*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pernyatan diatas diperkuat oleh ibuk Dewi Kasanova, SP., selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, dalam wawancara kepada peneliti yang menyampaikan :

> *" Kualitas dari hasil produksi mengalami peningkatan 3,9 Ton per/Tahun serta program peningkatan kesejahteraan petani sudah terlaksana dengan baik selama ini melalui kegiatan dan bantuan yang ada (Dewi Kasanova, SP., Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 22 April 2019_10 : 00 WIB)"*

Perlindungan sangat diperlukan oleh petani itu merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, upaya yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk perlindungan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh petani itu sendiri melalui musyawarah bersama. Sesuai dengan pertanyaan di atas berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden yaitu Bapak Benni Murdhani yang mengatakan :

> *" Bentuk perlindungan kepada petani yaitu Pemberian asuransi usaha tani. (Benny Murdhani, SP., Kasubag Perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 22 April 2019_16 : 00 WIB)"*

Senada dengan pernyataan diatas bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir melalui pemberian asuransi usaha tani di dukung dengan pernyataan bapak Dirhamsyah melalui wawancara yang mengatakan:

> *" Perlindungan kepada petani melalui Bidang Prasarana Sarana dan penyuluh (PSP) dalam bentuk Asuransi Pertanian. (Dirhamsyah, S.ST., Kasi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 21 Mei 2019_10 : 30 WIB)"*

Namun pernyataan diatas bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh bapak Syamsudin, SP, melalui wawancara sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

“ Asuransi usaha kepada petani tidak pernah ada. (Syamsudin, SP Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluh (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 21 Mei 2019_ 14.30 WIB)”

Perlindungan kepada petani meningkatkan hasil produktivitas hasil pertanian diberikan melalui berbagai upaya oleh dinas sebagaimana yang telah disaampaikan bapak Ali ambra dalam wawancara :

“ Produksi hasil pertanian sudah tinggi yaitu 6 – 6,5 Ton perhektar itu dilakukan melalui upaya penyuluhan untuk benih bermutu, pemupukan yang berimbang sesuai dengan ketentuan, trio tata air seperti tanggul dan lain –lain serta perawatan pertanian. (Ali Ambra, SP., Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kempas, 04 Mei 2019_15.30 WIB)”

Sehubungan dengan pendapat diatas bahwa perlindungan yangan dilakukan oleh Dinas sudah berjalan, seperti yang di sampaikan dalam wawancara penulis kepada bapak Suristo, SP., Penyuluh Perrtanian Kelurahan Kempas Jaya, yang mengatakan :

“ Perlindungan kepada petani diberikan berupa upaya pengendalian hama dan penyakit akan dicarikan solusi bersama, dalam kondisi darurat akan dibantu segi fisik/racun dibawah ambang batas ekonomi. (Suristo, SP., Penyuluh Perrtanian Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_ 17 : 00 WIB)”

Namun pernyataan diatas bertentangan dengan yang disampaikan oleh bapak Swi Suprayetno yang mengatakan :

“ Pernah dulu kena serang hama tapi tidak adanya solusi dari pihak dinas dan tidak ada asuransi juga jadi gagal total saat panen. Saya selama bertani hanya modal sendiri tidak pernah merasakan bantuan modal usaha tani atau penyelesaian mengenai permasalahan hama dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir. (Swi Suprayetno, Sekretaris Kelompok Tani Makmur Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_11 : 00 WIB)”

Program peningkatan kesejahteraan petani oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabuapten Indragiri Hilir masih belum diketahui oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

petani seperti yang di sampaikan oleh bapak Asep Hermawan, dalam wawancara sebagai berikut :

> *" Belum pernah merasakan dan tidak tahu mengenai program tersebut. (Asep Hermawan, Gapoktan Maju Bersama Kempas Jaya, 2 Mei 2019_16 : 00 WIB)"*

Senada dengan pernyataan diatas bapak Swi Suprayetno selaku Sekretaris Kelompok Tani Makmur Kelurahan Kempas Jaya melalui wawancara kepada peneliti, menyampaikan:

> *" Tidak mengetahui, mungkin ada tapi kami tidak mengetahui menganai program. (Swi Suprayetno, Sekretaris Kelompok Tani Makmur Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_11 : 00 WIB)"*

Pernyatan diatas diperkuat oleh Bapak Bapak Suhari selaku Ketua Kelompok Tani Setia Karya Kelurahan Kempas Jaya, dalam wawancara kepada peneliti yang menyampaikan :

> *" Ada, tapi tidak berjalan dibawah. (Suhari, Ketua Kelompok Tani Setia Karya Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_16 : 00 WIB)"*

Para petani memiliki harapan dari perlindungan yag telah diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang disampaikan bapak Asep Hermawan, bapak Suhari dan bapak Swi Suprayetno dalam Wawancara, yang mengatakan :

> *" Bantuan modal usaha, asuransi ketika gagal panen, serta pasarnya yang paling penting saat ini kami hanya menjual hasil tani kepada satu tengkulak saja. (Asep Hermawan, Gapoktan Maju Bersama Kempas Jaya, 2 Mei 2019_16 : 00 WIB)"*

Sehubungan dengan pendapat diatas bapak Swi Suprayetno menyampaikan bahwa harapannya terhadap perlindungan yang dilakukan oleh Dinas, di sampaikan dalam wawancara kepada penulis, yang mengatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

“ Kalau bisa bantuan modal atau usaha gitu dek, seperti pinjaman. Dan juga bantuan pupuk atau racun itu juga mungkin kalo bisa dibantu dengan harga yang lebih murah dari toko sudah mebantu, dulu pernah air pasang naik itu sampai 6 kali tanam benih mati semua, harapanya bisa dibuatkan tangul sama pihak dinas. Untuk pasar juga harapanya bisa dicarikan sama pihak dinas, selama ini kita jual kepada satu tengkulak saja/gudang dan mereka terima padi kita lebih murah dari pada orang luar yang ngantar ke gudang, seharusnya kan kita yang dekat ini dibeli mahal ini malah lebih murah. (Swi Suprayetno, Sekretaris Kelompok Tani Makmur Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_11 : 00 WIB)”

Bapak Suhari juga menyampaikan bahwa harapannya terhadap perlindungan yang dilakukan oleh Dinas, di sampaikan dalam wawancara kepada penulis, yang mengatakan :

“ Harapanya bisa merasakan bantuan-bantuan alat mesin pertanian seperti mesin pengering padi karena tidak bisa digunakan dan yang mengelola hanya orang gudang (swasta), serta juga ada kondisi mesin yang tidak bisa digunakan dikarenakan kondisi lahan lembut. Serta juga tidak adanya bantuan modal usaha dan juga pasar nya sebaginya bisa dijual keluar tidak nya dengan satu tengkulak saja. (Suhari, Ketua Kelompok Tani Setia Karya Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_16 : 00 WIB)”

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan petani mengeluhkan seperti, tidak adanya asuransi pertanian ketika petani mengalami kegagalan saat panen, tidak adanya solusi pasar dari dinas membuat petani hanya menjual hasil gabah/padi kepada satu orang tengkulak/ pengepul yang mengakibatkan monopoli harga kepada para petani, air pasang surut yang selalu terjadi membuat benih petani menjadi mati terendam air pasang yang seharusnya diperhatikan pemerintah seperti membangun tanggul ditepian sungai area pertania masyarakat dan serta peminjaman modal kepada pihak swasta dikarenakan tidak adanya peminjaman yang dilakukan oleh pemerintah . Pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir harus memberikan perlindungan kepada petani untuk mewujudkan kemandirian dan kesjahteraan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

petani di Kelurahan Kempas Jaya. Dari hasil observasi dan wawancara peneliti maka Perlindungan kepada petani di kelurahan kempas jaya masih terbilang lemah.

Setelah dilakukanya wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan dengan judul peneliti " Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir" upaya pemberdayaan petani melalui program peningkatan kesejahteraan petani masih terbilang lemah karena kegiatan-kegaiatan dan bantuan dari program peningkatan kesejahteraan petani belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh petani di Kelurahan Kempas Jaya.

Upaya pemberdayaan petani di kelurahan kempas jaya dilakukan secara bertahap melalui kegiatan dari dinas dan berbagai bantuan untuk petani. Kegiatan dan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan petani.

Dan berdasarkan penelitian diatas menurut teori yang ada dikemukakan oleh Ginanjar Kartassamita (Kartasasmita 1995:84) dan Wrihatnolo & Dwijiwijoto (2007:2) bahwa pemberdayaan petani di kelurahan kempas jaya sudah dilakukan dengan pendekatan dan ciri pemberdayaan, namun masih terbilang lemah. Karena menurut teori Ginanjar Kartassamita dan Wrihatnolo & Dwijiwijoto pemberdayaan harus mengikuti tiga upaya besar yaitu Penyadaran, Penguatan dan Perlindungan, serta satu sama lain saling berkaitan yang merupakan tahapan pemberdayaan masyarakat. Maka pemberdayan petani di kelurahan kempas jaya haruslah berkaitan dengan tiga pokok tahapan pemberdayaan tersebut, agar pemberdayaan petani di kelurahan kempas jaya tepat pada sasaran pengembangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

potensi dan kesejahteraan petani di kelurahan kempas jaya, karena tiga tahapan tersebut saling berkaitan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti dengan judul Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, maka peneliti menemukan Model Pemberdayaan Petani berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Model V.1 : Model Pemberdayaan Petani

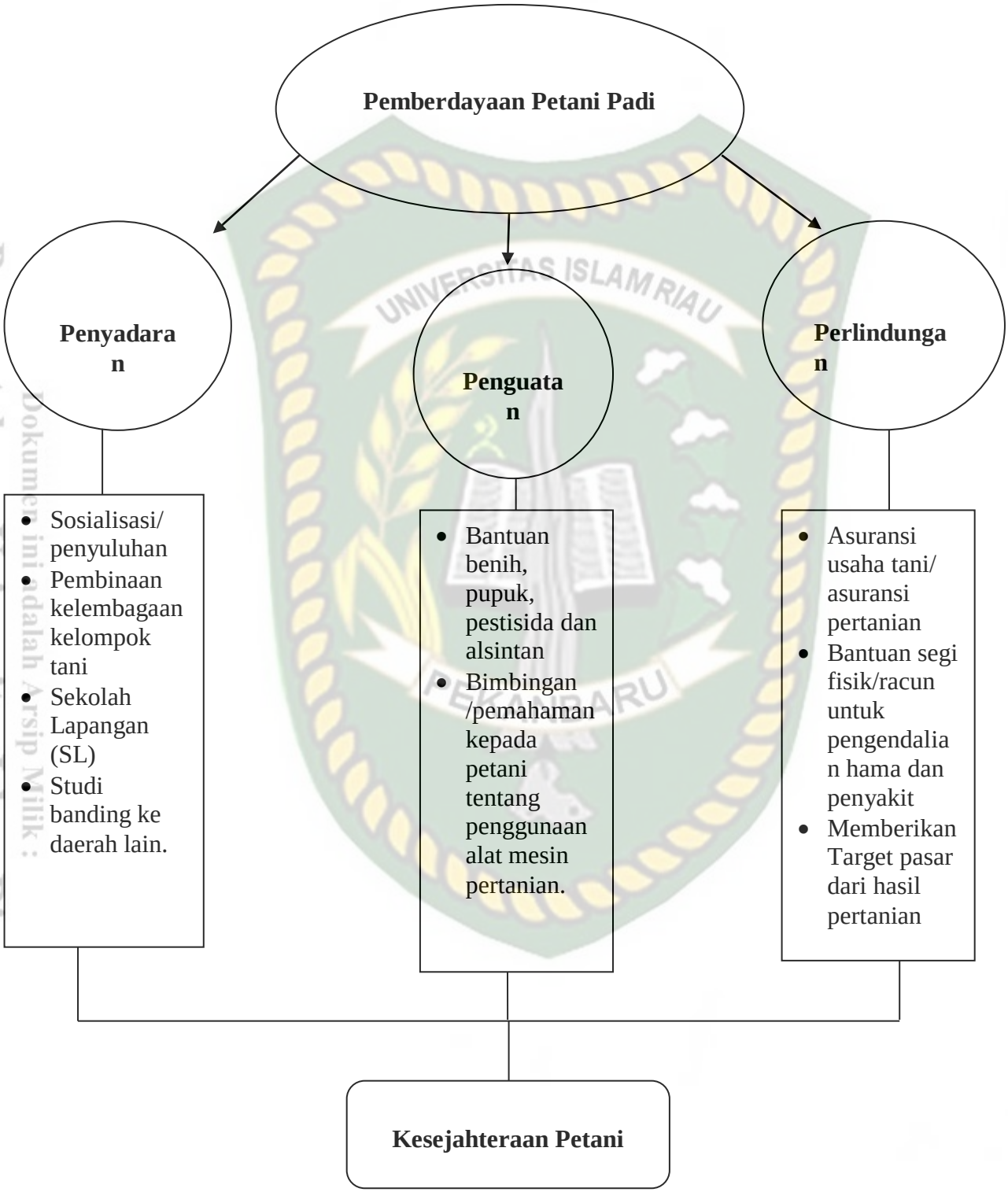

Sumber olahan peneliti 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Model diatas maka peneliti menyimpulkan Pemberdayaan Petani Padi dilakukan dengan tiga tahapan yaitu (1) Penyadaran dengan kegiatan Sosialisasi/ penyuluhan, Pembinaan kelembagaan kelompok tani, Sekolah Lapangan (SL), Studi banding ke daerah lain (2) Penguatan dengan kegiatan Bantuan benih, pupuk, pestisida dan alsintan, Bimbingan /pemahaman kepada petani tentang penggunaan alat mesin pertanian (3) Perlindungan dengan kegiatan Asuransi usaha tani/ asuransi pertanian, Bantuan segi fisik/racun untuk pengendalian hama dan penyakit, Memberikan Target pasar dari hasil pertanian. Dengan tujuan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Hambatan- hambatan yang dihadapi dalam proses upaya Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lemah karena disebabkan beberapa faktor penghambat berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi peniliti dilapangan dapat dilihat sebagai berikut, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang menyatakan :

> *“ Keterbatasan anggaran yang dimiliki dinas belum bisa memenuhi kebutuhan – kebutuhan kepada petani secara optimal. (Ir. H. Kuswari., MP, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 21 Mei 2019_16 : 30 WIB)”*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pernyataan diatas diperkuat oleh Bapak Benny Murdhani SP selaku Kasubag Perencanan dan Pengendalian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatakan:

> *“ Anggaran perencanaan dan pengendalian program peningkatan kesejahteraan petani yang ada saat ini dirasa sangat minim untuk meningkatkan petani khususnya di Kelurahan Kempas Jaya. (Benny Murdhani, SP., Kasubag Perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 22 April 2019_16 : 00 WIB)”.*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah memiliki anggaran untuk Pemberdayaan petani melalui Program peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri sudah terlaksana. Namun keterbatasan serta minimnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas ini yang menjadi faktor penghambat Dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dari segi faktor anggaran terhadap Pemberdayaan petani di Kelurahan Kempas Jaya. Berikut wawancara peneliti dengan Ibuk Dewi Kasanova SP selaku Sekertaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatakan :

> *“ Sejauh ini Sumberdaya manusia Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir belum memadai dan kurangnya keterampilan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya anggaran pelatihan sekala daerah maupun nasional serta yang sebaiknya penyuluh membawahi 8 kelompok tani dalam setiap Kelurahan/ Desa. (Dewi Kasanova, SP., Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indarigiri Hilir, 22 April 2019_10 : 00 WIB)”.*

Senada dengan pernyataan diatas mengenai faktor hambatan – hambatan peneliti memperkuat argumen melalui wawancara dengan Penyuluh pertanian Kelurahan Kempas Jaya yaitu Bapak Suristo SP yang mengatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *“ Harapan kami sebagai tenaga penyuluh diberikan ruang dan pelatihan secara berkesinambungan agar peningkatan skill dan keterampilan tenaga penyuluh untuk memberikan pemahaman kepada petani. (Suristo, S., Penyuluh Perrtanian Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_ 17 : 00 WIB)”.*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lemah dikarenakan sumber daya manusia yaitu tenaga penyuluh yang ada pada Dinas belum memadai dan kurangnya keterampilan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya anggaran pelatihan. Hal ini menjadi faktor pengambat dan tidak mampu meningkatkan *skill* dan keterampilan tenaga penyuluh di karenakan Faktor kurangnya sumberdaya manusia pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suhairi dalam wawancara yang menyampaikan :

> *“ Kurang aktifnya salah satu ketua kelompok tani dalam menyampaikan aspirasi petani di Kelurahan Kempas jaya. (Suhari, Ketua Kelompok Tani Setia Karya Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_16 : 00 WIB)”*

Pernyataan diatas diperkuat oleh Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatakan :

> *“ Program Pemerintah rutin disampaikan kepada petani melalui ketua kelompok tani karena terbatasnya anggaran dan waktu. Tetapi menurut hemat saya ada beberapa oknum ketua kelompok tani yang tidak berperan aktif sebagaimana mestinya. Sehingga dinas dan petani terputus dalam penyampaikan bantuan dan informasi program. (Syamsudin, SP Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluh (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 21 Mei 2019_ 14.30 WIB)”.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari ungakapan diatas dapat dilihat kurang aktifnya ketua kelompok tani yang menyebabkan tidak berjalannya proses pemberdayaan petani di Kelurahan Kempas Jaya sehingga Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dan petani terputus dalam penyampaian bantuan serta informsi program. Berdasarkan observasi peneliti bahwa dalam proses pemberdayaan petani tentu banyak hambatan dalam proses pelaksanaannya. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak Swi Suprayetno dalam wawancara yang mengatakan :

> *" Tidak semuanya disini petani memiliki lahan ada juga yang hanya menerima upah kerja saja. (Swi Suprayetno, Sekretaris Kelompok Tani Makmur Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_11 : 00 WIB)".*

Senada dengan ungkapan diatas diperkuat dalam wawancara peneliti kepada Bapak Suhari yang mengatakan :

> *" Disini kebanyakan petani turun temurun dari orang tua dulu, jadi ada juga yang menggunakan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan dengan pembagian dari hasil panen karena jika menyewa lahan kebanyakan pemilik lahan tidak mau jadi sistemnya bagi hasil jika hasil panen 3 karung maka satu karung untuk pemilik lahan dan 2 karung untuk petani. (Suhari, Ketua Kelompok Tani Setia Karya Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_16 : 00 WIB)"*

Berdasarkan ungkapan diatas diatas peneliti menyimpulkan faktor pemakaian lahan merupakan salah satu faktor hambatan dalam pemberdayaan petani di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil observasi peneliti hamabatan dalam proses pemberdayaan petani di Kelurahan Kempas Jaya salah satunya yaitu faktor alam air sungai pasang surut di dekatlahan pertanian petani. Hal ini disampaikan oleh Bapak Swi Suprayetno dlam wawancara sebagaimana berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *“ Pernah air pasang naik itu sampai 6 kali tanam benih mati semua, harapannya bisa dibuatkan tangul sama pihak dinas. (Swi Suprayetno, Sekretaris Kelompok Tani Makmur Kelurahan Kempas Jaya, 24 April 2019_11 : 00 WIB)”.*

Pernyataan diatas diperkuat oleh Bapak Ali Amra sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kempas yang menyampaikan:

> *“ Kita lagi upayakan untuk membuat tanggul di kelurahan kempas jaya memang disana sering terendam saat air pasang naik membuat petani mengalami kerugian itu kondisi alam yang harus kita antisipasi bersama. (Ali Ambra, SP., Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kempas, 04 Mei 2019_15.30 WIB)”.*

Berdasarkan ungkapan diatas peneliti melihat faktor alam merupakan salah satu hambatan yang ada dalam proses pemberdayaan petani di Kelurahan Kempas Jaya karena permasalahan air pasang surut yang merendam lahan pertanian petani yang menimbulkan kerugian bagi petani yang merupakan kondisi alam yang harus di antisipasi oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut Moeljarto (1996: 149), faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan adalah masalah struktural yang telah mengalahkan masyarakat miskin terhadap interest pribadi aparat desa atau lapisan yang lebih kuat. Selain itu, mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti, maka peneliti berpendapat ada beberapa faktor hambatan-hambatan dalam proses pemberdayaan petani di Kelurahan Kempas Jaya, diantaranya :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Faktor Oknum Ketua Kelompok Tani Yang Tidak Aktif

Kurang berperan salah satu oknum ketua kelompok tani dalam memyampaikan aspirasi masyarakat dan dalam menyampaikan bantuan pemerintah sehingga terputusnya komunikasi antara pemerintah dan petani yang menyebabkan terhambatnya proses pemberdayaan petani di Kelurahan Kempas Jaya.

2. Faktor Anggaran

Keterbatasan anggaran yang dikeluarkan maka pelaksanaan kegiatan dan bantuan kepada petani menjadi terhambat. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya proses pemberdayaan petani di Kelurahan Kempas Jaya.

3. Faktor Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya Sumber daya manusia sebagai tenaga penyuluh lapanagan yang mempengaruhi kurang maksimalnya kinerja pemerintah. Serta tenaga penyuluh yang ada pada Dinas belum memadai dan kurangnya keterampilan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan dengan judul yaitu "Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir " maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan di kemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam upaya Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari masih belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas yaitu (1) Penyadaran yang dilakukan masih terbilang lemah karena masih banyak petani yang tidak memahami mengenai mesin alat pertanian serta minimya petani yang mendapatkan sosialisasi. Hal ini dilihat bahwa Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui penyuluh pertanian di Kelurahan Kempas Jaya (2) Dalam hal Penguatan kepada petani bahwa Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indragiri Hilir belum malakukan penguatan secara optimal ini dilihat dari tidak keseluruhannya petani mendapatkan bantuan dari dinas serta belum tepat sasaran bantuan tersebut (3) perlindungan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lemah kepada petani, dikarenakan belum adanya pasar yang diberikan oleh dinas serta tidak adanya bantuan/jaminan usaha kepada petani (Asuransi Pertanian). Hal ini membuktikan bahwa msih lemah nya upaya Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan – hambatan dalam Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yakni (1) Faktor hambatan dari masyarakat yaitu faktor sistem pemakaian lahan dan Faktor Oknum Ketua Kelompok Tani Yang Tidak Aktif (2) Faktor hambatan dari alam (3) Faktor hambatan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabuapten Indragiri Hilir yaitu faktor anggaran dan faktor Minimnya Sumberdaya Manusia (SDM).

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabuapten Indragiri Hilir memberikan pelatihan berkaitan dengan mengenai penggunaan alat pertanian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabuapten Indragiri Hilir memastikan bantuan yang diberikan kepada petani tepat sasaran
3. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabuapten Indragiri Hilir mengusahakan jaminan penjualan padi milik petani seperti membuat strategi agar hasil dari produksi padi lebih menguntungkan petani.
4. Ketua kelompok tani yang tidak aktif disarankan agar aktif kembali melalui penyuluh pertanian mengkoordinasikan pengoptimalan kelompok tani dalam hal ini agar aktif dalam menyampaikan informasi, menanyakan program serta mengkoordinir anggota kelompok tani.
5. Disarankan agar Tenaga Penyuluh & Pendamping pertanian untuk segera ditambah yang sebelumnya dari satu tenaga penyuluh setiap kelurahan menjadi satu tenaga penyuluh setiap kelompok tani dan lebih ditingkatkan lagi kemampuan penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada petani.
6. Disarankan agar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabuapten Indragiri Hilir hendaknya anggaran dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang ada digunakan secara tepat pada sasaran karena banyaknya bantuan yang belum di dapat oleh petani serta minimnya sosialisasi yang diberikan kepada petani yang menjadi pengambat berjalannya permberdayaan petani di Kelurahan Kempas Jaya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana., 2015., *Pengantar Manajeme*n. Kebumen: Mediatera

Ambar Teguh Sulistyani., 2004., *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Bahua, Muhammad Ikbal., 2015., *Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia.* Gorontalo: Idea Publishing.

Budiarjo, Miriam., 2009., Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan., 2003., *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Busrizalti., 2013., *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya.* Yogyakarta: Total Media

Ginanjar Kartasasmita., 1995., *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat.* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Harrison, Lisa., 2007., *Metodologi Penelitian Politik.* Jakarta: Kencana.

Hasibuan, H. Malayu S.P., 2014., *Organisasi &Motivasi; Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hikmat, Harry., 2001., *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: Humaniora Utama Press

Ife, J.W., 1995., *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice.* Australia: Longman

Labolo, Muhadam., 2006., *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya.* Jakarta: Grafindo

Lexy, Moleong., 2007., *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya Offset

Mardikanto, Totok., 2013., *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta

Margono. S., 2010., *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Miles, M. B., dan A. M. Huberman., 1992., *Analisis Data Kualitatif.* Penerjemah Tjejep Rohidi. Jakarta: UI Pres.

Miriam Budiardjo., 2000., *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia

Misdayanti dan KartaSaputra., 1993., *Fungsi Pemda dalam Pembuatan Perda.* Jakarta: Bumi Aksara

Miftah Thoha., 2003., *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raya Grafindo

Mubyarto., 1983., *Pengantar Ekonomi Pertanian,* Edisi Ketiga, LP3ES .Yogyakarta.

M. Manullang., 2002., *Dasar-Dasar Manajemen Cetakan 16.* Yogyakarta

Nasikun., 1993., *Sistem Sosial Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu., 2011., *KYBERNOLOGI : ILMU PEMERINTAHAN BARU I* PT. RINEKA CIPTA, Jakarta

Prijono dan Pranarka Vidhandika Moeljarto., 1996., *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS

Pranoto, Juni., 2011., *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta

Robbins, Stephen P., 2006., *Perilaku Organisasi.* Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia

Rasyid., 1998., *Pemerintahan yang Amanah.* Jakarta: Binarena Pariwara

Sa'ud, Syaifudin, Udin., 2014., *Inovasi Pendidikan, Cet Ke –VII*. Bandung : Alfabeta

Sjamsir, Zulkifli., 2017., *Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal.* Cetakan I. Makassar: CV. Sah Media

Sulistiyani, A.T., 2004., *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.* Yogyakarta: Gaya Media.

Sumodiningrat, Gunawan., 2010., *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumddiningrat dan Nugroho., 2005., *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-Negara yang Unggul dalam Persaingan Global.* Jakarta: Elexmedia Komputindo

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Siagian, P. Sondang., 2003., *Filsafat Administrasi,* Jakarta. Bumi Askara.

Syafiie, Kencana, Inu., 2011., *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat

Sugiyono., 2012., *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Sukandarrumidi., 2002., *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Gajah Mada University Prees

Subakti, Ramlan., 2010., *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana

Subakti, Ramlan., 1992., *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta : Gramedia Widya Sarana

Terry, R George., 2004., *Prinsip-Prinsip Manajemen. (Terjemahan) 2003. Cetakan ke 7*: Penerbit PT. Bumi Aksara

Usman, Husaini., 2000., *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Usmara., 2002., *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jogjakarta: Asmara Books

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto., 2007., *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Zulkifli., 2009., *fungsi-fungsi manajemen.* Pekanbaru. UIR Press.

Jurnal

Iskandar, M. Hatta., 2010., *Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kota Palembang.* Jurnal Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Vol 1. No.2

Ginanjar, Kartasasmita., 1995., *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat.* Jurnal pPemberdayaan Masyarakat. Bestari

Karsidi, Ravik., 2002., *Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan Kecil.* Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Pascasarjana UNS.

Manuwoto, Syafrida., 1998., *Pembangunan Agribisnis Berkelanjutan.* AGRIMEDIA. vol. 4. no. 1: 21-22

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Moeljarto, Vidhyandika., 1996., Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT", dalam Onny S. Prijono dan A.M.V. Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CIDES.

Racmad., 2016., *Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu.* Jurnal Katalogis. Vol. 4 No.3.

Ras, Atma., 2013., *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.* Jurnal Socius. Vol. XIV.

Subhechanis Saptanto, Tikyrino Kurniawan, Hertria Maharani Putri dan Tajerin., 2017., *Analisis Penentuan Indikator Kunci Dalam Penghitungan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.* : Jakarta Utara

Sugiri, Lasiman., 2012., Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Negara.* STISIPOL Dharma Wacana Metro

Internet

Produktivitas Padi di Kabuapten Indragiri Hilir :
https://inhilkab.bps.go.id/statictable/2016/08/09/104/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-sawah-dan-padi-ladang-menurut-kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir--2015.html. Diakses pada tangal 09 Desember 2019 jam 04.17 WIB

https://inhilkab.bps.go.id/statictable/2016/01/15/96/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-sawah-dan-padi-ladang-menurut-kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir-2014.html. Diakses pada tangal 09 Desember 2019 jam 04.17 WIB

Kabupaten Indragiri Hilir :
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir. Diakses pada tangal 09 Desember 2019 jam 05.31 WIB

Perundang-Undangan

Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indinesia No 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dokumen Lainnya

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan. 2014. *Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018*. Tembilahan: DTPHP

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau. 2016. *Pengembangan UPJA Profesional*. Pekanbaru: UPT Mekanisasi Provinsi Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :